



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER



LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**TRIWULAN I
2026**

✉ layanangepusdatin@kkp.go.id
🌐 portaldata.kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wata'alla atas rahmat-Nya, ridho'-Nya, dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

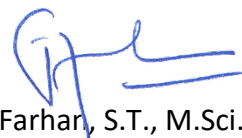
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2026, terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja, dimana 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 1 (satu) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Plt. Sekretaris Jenderal yang telah memberikan arahan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026 ini. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, April 2026
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Aulia Riza Farhar, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.
NIP. 197208122001121002

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT DATA DAN INFORMASI
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi untuk periode Triwulan I tahun 2026 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Data dan Informasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, April 2026

Kepala Pusat Data dan Informasi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aulia Riza Farhan'.

Aulia Riza Farhan

NIP. 197208122001121002



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

CAPAIAN KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI TRIWULAN I TAHUN 2026

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#pusdatinKKP #JUARA KKP 2026

NILAI KINERJA
ORGANISASI (NKO)

110,27

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan

Target 2025

Realisasi TW I 2025

Capaian s/d Desember (%)

IKU.01	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	92,00	-	-
IKU.02	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,60	-	-
IKU.03	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%)	78,00	-	-
IKU.04	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,30	-	-
IKU.05	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	78,00	-	-
IKU.06	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	92,00	-	-
IKU.07	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (%)	100,00	-	-
IKU.08	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,10	-	-
IKU.09	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (%)	65,00	-	-
IKU.10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3,00	-	-
IKU.11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,75	-	-
IKU.12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,65	-	-
IKU.13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,90	-	-
IKU.14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,70	93,52	104,26

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data dan Informasi

IKU.15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87,20	-	-
IKU.16	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100,00	-	-
IKU.17	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	82,50	-	-
IKU.18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	86,00	100,00	116,28
IKU.19	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95,00	-	-

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Data dan Informasi dalam melaksanakan rencana kinerjanya mendukung terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui penetapan sasaran kinerja yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusat Data dan Informasi. Adapun sasaran kinerja Pusdatin adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, dan Informasi Kelautan dan Perikanan serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, dan Informasi**. Untuk mewujudkan Sasaran Kinerja tersebut, Pusdatin mempunyai 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 1 (satu) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang diukur secara triwulanan antara lain Survei Kepuasan Masyarakat KKP dengan capaian pada Triwulan I adalah 93,52 atau 104,26% dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin dengan capaian pada Triwulan I adalah 100% atau 116,28%.

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026 pada aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*) diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **110,27%** dengan predikat **Istimewa**, capaian tersebut mengalami penurunan 1,32% jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025 dengan capaian sebesar 111,59% hal ini disebabkan karena hampir semua indikator kinerja Pusdatin mengalami kenaikan target.

Capaian ini didukung oleh pagu anggaran awal senilai **Rp77.155.803.000** dan setelah revisi menjadi senilai **Rp58.173.803.000** setelah adanya pagu blokir senilai **Rp18.982.000.000**. Sedangkan Realisasi Akruwal Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Maret 2026 berdasarkan aplikasi SAKTI telah direalisasikan secara akruwal senilai **Rp29.944.166.813** atau persentase realisasi total anggaran efektif adalah sebesar **51,43%**, dengan sisa anggaran total senilai **Rp28.091.254.187**.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja Utama beserta Tim SAKIP Pusdatin melakukan evaluasi menyeluruh

terhadap capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi ini menghasilkan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya, Pusdatin telah melakukan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan melalui kegiatan-kegiatan pendukung pada 8 (delapan) Tim Kerja lingkup Pusdatin;
2. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah 99,93%;
3. Monitoring pelaksanaan kegiatan per Kelompok Tim Kerja lingkup Pusdatin, melalui dialog kinerja setiap minggu sekali (pada hari Senin, pada saat apel pagi), agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan; dan
4. Menyusun Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 lingkup Pusdatin setiap triwulanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin	4
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin	8
1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi	9
1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional	12
1.4 Potensi	13
1.5 Tantangan	15
1.6 Kendala	16
1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	18
BAB 2	20
PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029	20
2.2 Program dan Kegiatan	23
2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026	23
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi	25
2.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2025	25
2.5 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2026, dan Perjanjian Kinerja Pusdatin 2026	28
BAB 3	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	36

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	40
3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan.....	40
3.3.2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	46
3.3.3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim	49
3.3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks).....	58
3.3.6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	65
3.3.7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	69
3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP.....	74
3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan.....	83
3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP.....	88
3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP.....	91
3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP.....	94
3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	97
3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP	101
3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	107
3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	111
3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	114
3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	120
3.3.20 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	124
3.4 Realisasi Anggaran.....	128
BAB 4	130
PENGHARGAAN DAN KEGIATAN LAIN	130
4.1 Penghargaan	130
4.2 Kegiatan Lain.....	130
BAB 5	133
KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	133
5.1 Kesimpulan.....	133
5.2 Rencana Tindak Lanjut	134
LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Fungsi Tim Kerja Lingkup Pusdatin	5
Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin	9
Tabel 3. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin	11
Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusdatin berdasarkan tim kerja	12
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin	13
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2026	23
Tabel 7. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Pusat Data dan Informasi Tahun 2026	26
Tabel 8. Indikator Kinerja Pusdatin pada Rencana Strategis KKP 2025-2029	30
Tabel 9. Keselarasan Renstra Setjen Tahun 2025-2029, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja	31
Tabel 10. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Triwulan I Tahun 2026	34
Tabel 11. Capaian Kinerja Anggaran dalam Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2026	36
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Triwulan I Tahun 2026	42
Tabel 13. Ukuran Kinerja Penilaian Survei Layanan Aplikasi Sistem Informasi	47
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi Triwulan I Tahun 2026	47
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Triwulan I Tahun 2026	50
Tabel 16. Nilai Kinerja API Command Center Triwulan I 2026	52
Tabel 17. Jumlah Laporan Kinerja Visualisasi dan Nilai Kinerja Aplikasi IMI	53
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan I Tahun 2026	59
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2026	62
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026	66
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi Triwulan I Tahun 2026	70
Tabel 22. Level Kematangan dan Rentang Indeks IKASANDI	76

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Triwulan I Tahun 2026.....	76
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2026.....	86
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Triwulan I Tahun 2026.....	89
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP Triwulan I Tahun 2026	92
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2026.....	95
Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Triwulan I Tahun 2026.....	99
Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2026	101
Tabel 30. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan I Tahun 2026.....	102
Tabel 31. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2026	103
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Triwulan I Tahun 2026	108
Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Triwulan I Tahun 2026	111
Tabel 34. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	115
Tabel 35. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	115
Tabel 36. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	116
Tabel 37. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	117
Tabel 38. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)	117
Tabel 39. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Triwulan I Tahun 2026.....	117
Tabel 40. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2026	122
Tabel 41. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2026.....	125
Tabel 42. Target dan Realisasi Akual Anggaran Pusdatin Menurut Output Triwulan I Tahun 2026	129
Tabel 43. Lampiran Dokumen Pendukung pada Rencana Aksi Pusdatin TW I 2026.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Infografis Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026.....	iii
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2026	4
Gambar 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	10
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Gambar 6. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026	33
Gambar 7. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026	34
Gambar 8. Koordinasi pendataan Kusuka di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	44
Gambar 9. Koordinasi pendataan Kusuka di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	45
Gambar 10. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Update Fitur Pengawasan Command Center .	56
Gambar 11. Audiensi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Kebijakan dan Tata Kelola	60
Gambar 12. Pembahasan IKU Inovasi Pelayanan Publik 2026.....	64
Gambar 13. Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) KKP.....	78
Gambar 14. Studi Banding Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ke BSSN	79
Gambar 15. Sosialisasi Daring Layanan Virtual Private Network (VPN).....	80
Gambar 16. Kegiatan migrasi layanan IP transit dan Metro-E dari Data Center ke lokasi Disaster Recovery Center (DRC).....	81
Gambar 17. Kegiatan pembaruan firmware pada perangkat switch di Data Center serta perangkat firewall FortiGate di lokasi Gambir.....	82
Gambar 18. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI.....	85
Gambar 19. Rapat Koordinasi Integrasi Data Prioritas	87
Gambar 20. Pengisian Arsitektur SPBE pada Aplikasi SIA-SPBE Lingkup Inspektorat Jenderal	90
Gambar 21. Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial	93
Gambar 22. Hasil Pelaksanaan PEKPPP Lingkup KKP Tahun 2025	96
Gambar 23. Menghadiri Penyampaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.....	100
Gambar 24. Validasi SKM KKP TW I Tahun 2026	105
Gambar 25. Pendaftaran Akun Admin Level 1 pada skm.go.id	105

Gambar 26. Koordinasi dan Pengenalan Aplikasi SKM Online Nasional	106
Gambar 27. Evaluasi Rencana Aksi TW I 2026 dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026	110
Gambar 28. Rapat Koordinasi dengan BPK lingkup Pusdatin	112
Gambar 29. Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) oleh SmartID	118
Gambar 30. Pelatihan Industry 4.0 and Future of Artificial Intelligence and Big Data Analytics oleh Singapore Cooperation Programme.....	119
Gambar 31. Pelatihan Basic Perpajakan Brevet A dan B yang diselenggarakan oleh PT Mitra Pajakku.....	119
Gambar 32. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bulanan Tahun 2026	123
Gambar 33. Rapat Penyampaian Realisasi dan Pembahasan Rencana Penarikan Dana (RPD) lingkup Pusdatin.....	127
Gambar 34. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2026	129
Gambar 35. Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia.....	130

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Triwulan I tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusat Data dan Informasi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi mengacu pada 1). Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 3). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP Instansi Pemerintah, 4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di KKP, 5). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029, 6). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja KKP 2025, 7). Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025-2029, 8). Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal yang menjelaskan tentang capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap capaian kinerja dan memberikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 difokuskan pada penguatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. KKP mengarahkan pembangunan pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya secara

berkelanjutan, penguatan swasembada garam, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai sumber pangan (*blue food*) dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah pesisir. Pada bidang tata kelola, KKP mengedepankan penguatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan berbasis risiko untuk menjamin keberlanjutan sumber daya serta akuntabilitas pelaksanaan program. Modernisasi sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan arah kebijakan tersebut, KKP Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusdatin KKP) memberikan dukungan dalam arah kebijakan KKP 2025-2029 dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan data serta informasi yang akurat dan relevan. Dukungan ini membantu KKP dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, melalui elaborasi:

1) Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pusdatin KKP bertugas mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber, termasuk data statistik perikanan, data produksi, data pasar, data lingkungan laut, dan data terkait isu-isu strategis lainnya. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna.

2) Pelayanan Informasi

Pusdatin KKP menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada internal KKP (pimpinan, jajaran, dan staf) serta eksternal (masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya). Informasi ini dapat berupa laporan, analisis, grafik, atau format lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3) Dukungan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Data dan informasi yang disediakan Pusdatin KKP digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan KKP. Ini termasuk

perencanaan anggaran, penentuan target, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan strategis.

4) Evaluasi dan Peningkatan

Data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Pusdatin KKP juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan KKP. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja KKP di masa depan.

5) Integrasi dengan Sistem Informasi Nasional

Pusdatin KKP juga berupaya untuk mengintegrasikan sistem informasi KKP dengan sistem informasi nasional lainnya, seperti sistem informasi pangan, sistem informasi lingkungan, dan sistem informasi lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan informasi di seluruh sektor pemerintahan.

Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I tahun 2026 ini sebagai dokumen evaluasi dan capaian kinerja lingkup Pusdatin sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP.

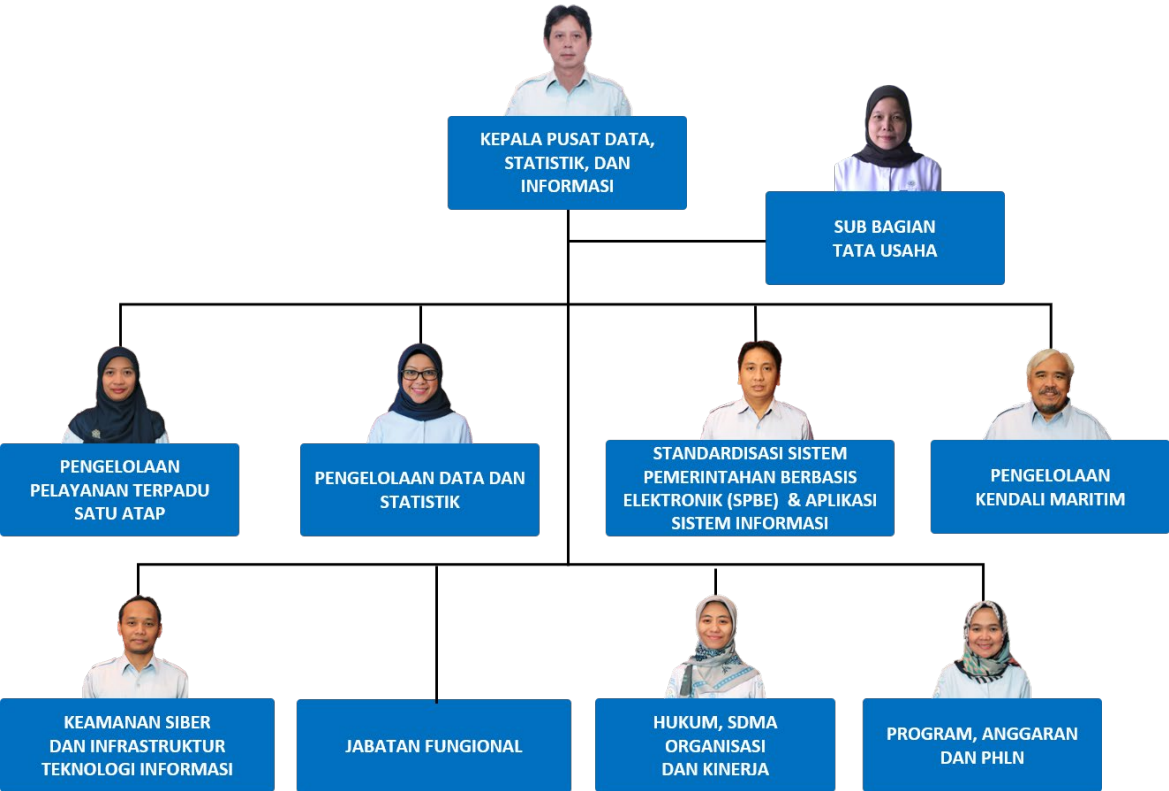
1.2 Tujuan

Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I tahun 2026 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin, sasaran strategis kegiatan/program, arah kebijakan yang ditetapkan, dan sebagai laporan atas realisasi, capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor B.151/SJ.8/KP.440/I/2026 tanggal 13 Januari 2026, dan dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 7 (tujuh) Tim Kerja. Dan berdasarkan SK Menteri KP No. 3/MEN-SJ/KP.430/V/2025, tanggal 7 Mei 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Sekretariat Jenderal KKP, maka telah ditetapkan Kasubbag Tata Usaha pada Pusdatin.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2026

Pada tabel berikut adalah Tim Kerja lingkup Pusat Data dan Informasi Tahun 2026 beserta uraian fungsinya:

Tabel 1. Uraian Fungsi Tim Kerja Lingkup Pusdatin

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Kasubbag Tata Usaha	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen); b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan draf perjanjian kerjasama; c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dalam hal kearsipan dan layanan pimpinan pada Pusat Data dan Informasi.
2.	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	Pemenuhan indeks pelayanan publik KKP.
		Tingkat kepatuhan Standar Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	a. Dukungan pengelolaan pelayan terpadu satu atap di lingkungan KKP; b. Pelaksanaan dan pemenuhan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP.
		Pelayanan Publik KKP (nilai)	
3.	Pengelolaan Data dan Statistik	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan b. Pelaksanaan pembangunan zona integrasi menuju WBK/WBBM.
		Tingkat Kepatuhan Pengelola data Kelautan dan Perikanan (persen)	a. Melakukan standardisasi dan statistik, pengelompokan data, dan metodologi statistik, serta pengelolaan master data kelautan dan perikanan; b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi data statistik kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Penyusunan dan analisis data tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan; dan e. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Melakukan pemenuhan tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	Melakukan pemenuhan indeks tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP.

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
4.	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan Aplikasi Sistem Informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	a. Melakukan pemenuhan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP; b. Koordinasi pelaksanaan <i>clearance</i> anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait; c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan KKP.
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	Melakukan pemenuhan implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP.
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; b. Melakukan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik lingkup KKP; c. Melakukan monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
		Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	a. Melakukan pemenuhan indeks layanan sistem dan teknologi informasi; b. Melaksanakan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP.
5.	Pengelolaan Kendali Maritim	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk dapat menggambarkan situasi secara real time; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan <i>decision support system</i>; d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset <i>command center</i> dan komputasi lingkup KKP; e. Melakukan integrasi sistem informasi pada unit kerja eselon I dan data citra berbasis satelit yang dimiliki oleh KKP; f. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
6.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	Persentase pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.
		Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada.
7.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; b. Melakukan kegiatan pengelolaan bandwidth dan infrastruktur jaringan KKP pusat.
8.	Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi/Verifikasi Kinerja Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka perencanaan, pengukuran SAKIP, penyusunan laporan kinerja per triwulan; c. Melakukan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan tahunan.
		Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin (indeks)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin; b. Mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan Uji Kompetensi pegawai lingkup Pusdatin c. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional dibawah binaan/PIC Pusdatin

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
9.	Program, Anggaran dan PHLN	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.
		Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; b. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Pusat Data, Statistik, dan Informasi berubah nomenklatur menjadi Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- f. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem informasi geospasial sumber daya kelautan perikanan;
- g. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi keamanan siber;
- h. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data dan Informasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Pusat dan informasi.

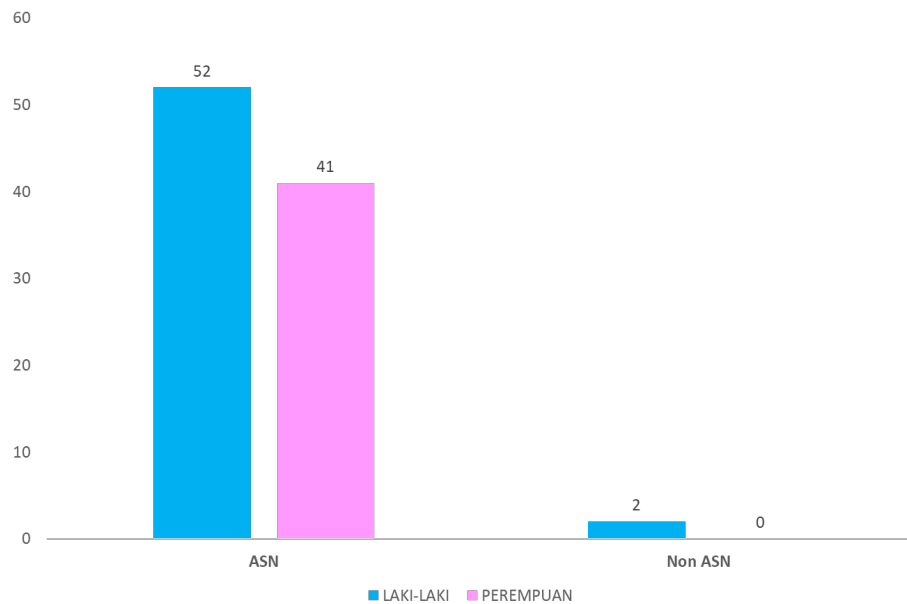
1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi

Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 95 orang pegawai yang terdiri dari 93 ASN dan 2 Non ASN. Sedangkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 76 orang dan 16 orang Pegawai Fungsional Umum (JFU), dengan perincian sebagai berikut:

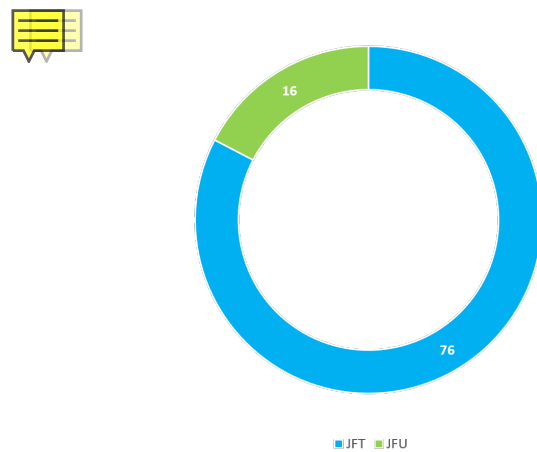
Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

Jabatan	Jumlah (orang)
Eselon II	1
Eselon IV	1
Jabatan Fungsional Tertentu	76
Pelaksana	14

Jabatan	Jumlah (orang)
Pelaksana Paruh Waktu	1
PJLP/Non ASN	2
Total	95



Gambar 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



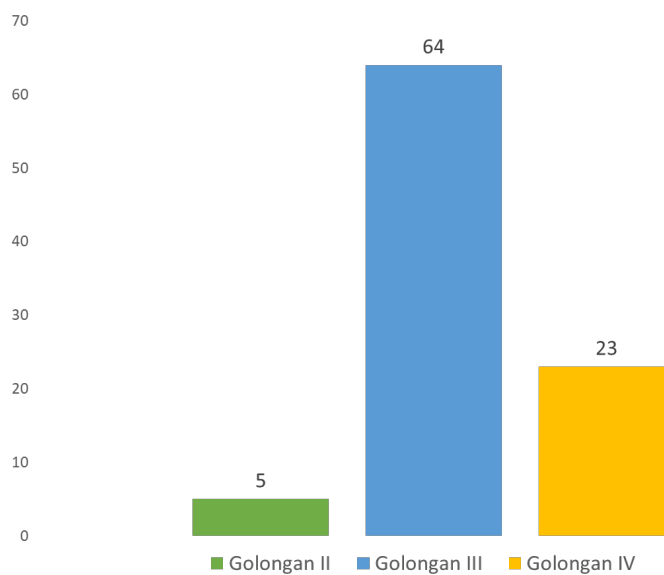
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin

NAMA JABATAN/ JENJANG JABATAN / JENJANG PENDIDIKAN	AHLI MADYA			AHLI MUDA		AHLI PERTAMA			MAHIR		TERAMPIL		Grand Total
	S1	S2	S3	S1	S2	D4	S1	S2	D3	SMA	D3	SMA	
Analisis Kebijakan					1								1
Analisis Pengelola Keuangan APBN		1											1
Analisis SDM							1						1
Arsiparis									1				1
Penata Perizinan		1				1	2						4
Perencana		1		1									2
Pranata Keuangan APBN												1	1
Pranata Komputer	3	7		4	4		22		1	1			42
Statistisi	2	4		1	2		7	1					17
Surveyor Pemetaan			2				3				1		6
Grand Total	5	14	2	6	7	1	35	1	2	1	1	1	76

Jika dilihat dari golongan ruang pada PNS, terdapat 23 orang golongan IV, 40 orang golongan III, dan 5 orang golongan II, sedangkan pada PPPK, terdapat 23 orang golongan IX dan 1 orang golongan VI.



Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN sesuai dengan Status Pegawai dan pendidikan pada Tim Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Pegawai Pusdatin berdasarkan tim kerja

TIM KERJA	ASN/ SMA	ASN/ D1	ASN/ D3	ASN/ D4	ASN/ S1	ASN/ S2	ASN/ S3	ASN/ SMA	Non ASN/ D3	Non ASN/ S1	Non ASN/ SMA
KAPUSDATIN							1				
TU			1		1	1				2	
DATA DAN INFORMASI			1		13	5	2				
HSDMAOK	1				1	2		1		3	
KITI			1		4	1		1	1	1	1
PAPHLN		1	1		3	1		2		2	2
PKM					10	3					
PTSA				1	3	1				1	
SPASI					11	8					

1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, Penata Perijinan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin pada Triwulan I tahun 2026.

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					Total
	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil	
Analisis Kebijakan		1				1
Analisis Pengelola Keuangan APBN	1					1
Analisis SDM			1			1
Arsiparis				1		1
Penata Perizinan	1		3			4
Perencana	1	1				2
Pranata Keuangan APBN					1	1
Pranata Komputer	10	8	22	2		42
Statistisi	6	3	8			17
Surveyor Pemetaan	2		3		1	6
Total	21	13	37	3	2	76

Catatan : Termasuk PPPK waktu paruh dan PJLP

1.4 Potensi

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berhubungan erat dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi, dan memanfaatkannya secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi saat ini antara lain Sumber Daya Manusia dengan jumlah 95 orang, fasilitasi ruangan *Command Center* KKP, yang berfungsi menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), yang bertugas sebagai unit pengelola perizinan perikanan dan kelautan terpadu lingkup KKP, Portal

Satu Data KP, yang berfungsi menyajikan data statistik kelautan dan perikanan secara *real time* dalam bentuk *dashboard*, peralatan infrastruktur jaringan kantor KKP, serta aplikasi-aplikasi yang mendukung administrasi kepegawaian, produk hukum KKP, bantuan pemerintah. Selain itu juga mempunyai unit pelayanan teknis BPISDKP di Perancak, Jembrana, Bali dengan citra satelit buminya berfungsi untuk memantau kondisi terkini dari kapal penangkap ikan dan kapal pengawas. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki satu stasiun bumi penerima data satelit radar yang berlokasi di Perancak - Bali dan telah beroperasi sejak tahun 2013. Stasiun bumi ini merupakan fasilitas dari UPT Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP). Stasiun Bumi Penerima data Satelit Radar memiliki peran strategis dalam *direct donwlink*, pengolahan, dan pemanfaatan data satelit radar untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Fasilitas ini dilengkapi dengan antena berdiameter 5,4 meter buatan ViaSat yang beroperasi pada frekuensi X-band, sehingga mampu menerima data beresolusi tinggi dari satelit radar seperti Radarsat-2 (RS-2) dan COSMO-SkyMed (CSK).

Dengan kebijakan pembangunan teknologi yang mengedepankan transformasi digital dan mendukung Asta Cita Presiden, potensi yang diunggulkan adalah pembentukan Satuan Pelaksanaan BPISDKP di Batam yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan serta pemenuhan data citra satelit untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemenuhan informasi geospasial sumber daya kelautan perikanan.

Konfigurasi Bali–Batam ini sekaligus menjadi fondasi penguatan *Ocean Big Data* Indonesia, yaitu ekosistem data kelautan berskala besar yang mengintegrasikan citra satelit, sensor oseanografi, sistem pemantauan kapal perikanan, radar, dan model numerik. Melalui *direct downlink* berkapasitas tinggi, data beresolusi tinggi dapat segera diolah menjadi informasi strategis untuk deteksi kapal, pemantauan dinamika oseanografi, potensi perikanan, kesehatan ekosistem pesisir, hingga deteksi dini

marine debris. Satuan Pelayanan dan UPT memiliki keterkaitan erat dalam memastikan tersedianya data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan berbasis data.

1.5 Tantangan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pusdatin adalah menyediakan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan berbasis data. Untuk mendukungnya, Pusdatin berencana membentuk Satuan Pelaksanaan di Batam sebagai konfigurasi dengan BPISDKP yang berada di Prancak Bali, sebagai fondasi penguatan *Ocean Big Data*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi tantangan yang kompleks dalam mewujudkan sistem pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi berbasis satelit. Ketergantungan pada layanan satelit asing membuat akses terhadap data strategis tidak sepenuhnya berada dalam kendali nasional, sehingga menimbulkan risiko terhadap kedaulatan data, keamanan informasi, dan efektivitas pengambilan keputusan. Secara rinci tantangan tersebut antara lain:

1. Sistem deteksi kapal yang mampu bekerja secara *real-time* karena praktik *IUU Fishing* yang menjadi ancaman serius bagi kedaulatan maritim Indonesia dan banyak kapal sengaja mematikan sistem transmitter kapal (AIS/VMS) untuk menghindari pengawasan, sehingga satelit menjadi instrumen penting untuk mendeteksi keberadaan kapal “*dark vessels*” yang tidak terpantau oleh sistem konvensional;
2. Indonesia menghadapi fenomena oseanografi kompleks seperti El Niño–La Niña, perubahan suhu permukaan laut, arus, tinggi gelombang, dan konsentrasi klorofil. Kondisi ini memengaruhi distribusi ikan, produktivitas perikanan, serta kesehatan ekosistem laut. Data satelit oseanografi yang konsisten dan *real-time* sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan adaptasi iklim, riset ilmiah, dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat pesisir. Satelit berperan penting

- dalam mengidentifikasi daerah penangkapan ikan yang produktif dengan memanfaatkan data oseanografi dan distribusi klorofil;
3. Informasi daerah penangkapan ikan membantu nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan yang efisien, mengurangi biaya operasional, serta menjaga keberlanjutan stok ikan; dan
 4. *Marine debris*, khususnya sampah plastik, semakin mengancam ekosistem laut dengan merusak rantai makanan dan menurunkan kualitas lingkungan pesisir. Satelit memiliki potensi besar untuk mendeteksi pergerakan massa air dan akumulasi material di laut, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi area rawan penumpukan sampah. Deteksi dini ini penting untuk memitigasi dampak ekologis, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh *marine debris*.

1.6 Kendala

Pemanfaatan data citra satelit radar terus meningkat untuk mendukung berbagai kegiatan strategis seperti pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), pemantauan perubahan wilayah pesisir, serta penyediaan informasi geospasial tematik. Saat ini, pengelolaan stasiun bumi masih menjadi bagian dari fungsi yang lebih luas di Pusdatin terutama pada BPISDKP, sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan fokus, sumber daya manusia, dan efektivitas operasional dalam mendukung layanan data satelit yang semakin meningkat.

Sejalan dengan ketentuan bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja Khusus, maka pembentukan Satuan Pelaksana Stasiun Bumi Batam Pusdatin menjadi kebutuhan yang strategis dan relevan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Pelaksana Stasiun Bumi Batam berperan sebagai garda terdepan dalam sistem hulu (*upstream system*) pengelolaan data satelit KKP, yang memastikan ketersediaan data secara *real-time*, akurat, dan berkelanjutan. Peran ini sekaligus memperkuat fungsi Pusdatin sebagai integrator data nasional serta BPISDKP sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan informasi geospasial kelautan dan perikanan.

Dalam pembentukan Satuan Pelaksana Stasiun Bumi Batam membutuhkan Sumber Daya Manusia, kendala yang dihadapi dalam penyediaan SDM/*rekrutmen* SDM berdasarkan Analis Beban Kerja. Beban kerja pada Satuan Pelaksana Stasiun Bumi Batam memiliki karakter yang sangat spesifik dan strategis, yaitu bersifat kritis, berkelanjutan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7), serta berbasis teknologi tinggi. Hal ini sejalan dengan peran stasiun bumi sebagai infrastruktur utama dalam sistem penerimaan data satelit yang mendukung penyediaan informasi kelautan dan perikanan secara *real-time*.

Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusdatin secara keseluruhan berjumlah 95 orang, dengan 2 orang Jabatan Struktural, 76 orang Jabatan Fungsional, dan 14 orang Pelaksana, serta 3 orang PPNPN/PJLP. Sedangkan SDM di BPISDKP berjumlah 46 orang, dengan 2 orang Jabatan Struktural, 16 orang Jabatan Fungsional, dan 28 orang Pelaksana. Untuk menjamin keberlangsungan operasional stasiun bumi secara optimal, diperlukan alokasi pegawai yang mencerminkan pembagian fungsi teknis dan dukungan operasional. Prinsip penentuan kebutuhan pegawai ditetapkan berdasarkan:

1. Kebutuhan operasional shift 24/7;
2. Kompleksitas sistem seperti antena, sistem *telemetry, tracking, and command* (TT&C), *server*, jaringan);
3. Kebutuhan pengolahan data dan keamanan informasi; serta
4. Standar minimal operasional infrastruktur kritikal.

Dengan mempertimbangkan karakteristik operasional stasiun bumi yang bersifat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7), serta kebutuhan sistem shift dan redundansi personel, maka kebutuhan riil pegawai menjadi lebih tinggi dibandingkan kebutuhan normatif. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM sesuai hasil ABK menjadi krusial guna menjamin keberlangsungan operasional layanan data satelit, keandalan infrastruktur, serta kualitas layanan informasi kelautan dan perikanan. Sehingga kondisi tersebut menjadi kendala dalam pemenuhannya. Sumber Daya Manusia yang kompeten merupakan fondasi dalam pelaksanaan SAKIP suatu organisasi.

1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2025 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja triwulan I tahun 2026 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tujuan, organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi, permasalahan, tantangan, dan kendala serta sistematika penyusunan laporan kinerja.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun, tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya, keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusdatin.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
 - Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja);
- Menginformasikan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

4. **Bab IV Prestasi dan Kinerja Lainnya**, menjelaskan capaian prestasi dan capaian kinerja lainnya yang diperoleh pada periode tahun 2025 pada unit kerja Eselon II.
5. **Bab V Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan rencana tindak lanjut pada periode selanjutnya. menjelaskan capaian prestasi dan capaian kinerja lainnya yang diperoleh pada periode triwulan I tahun 2026 pada unit kerja Eselon II.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2025-2029

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, KKP menentukan misi yang mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. "Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. "Meningkatkan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada Tahun 2025-2029 Setjen KKP menetapkan visi, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional" untuk mewujudkan "Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan". Sekretariat Jenderal KKP sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam

melaksanakan Misi KKP ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Sebagai dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, Setjen KKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

Untuk mewujudkan Misi Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029 tersebut, Setjen KKP perlu menetapkan Sasaran Program (SP). Sasaran program Setjen KKP ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke- 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029. Sasaran program tersebut didukung dengan penetapan kegiatan yang merupakan turunan dari Rencana Kerja Sekretariat Jenderal. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Setjen tahun 2025 yang terdiri atas: a.) arah kebijakan, sasaran strategis, program (sasaran program dan indikator sasaran program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta dukungan terhadap prioritas nasional; b.) matriks Renja Sekretariat Jenderal Tahun 2025; c.) rincian prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; dan d.) rincian pagu alokasi anggaran per program dan per unit organisasi Tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka ditetapkan beberapa sasaran dan indikator kinerja lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, antara lain:

1. Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi KKP, Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP, Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP, Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, serta Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal; dan

2. Sasaran PNBPU BLU Sektor KP Meningkat dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pencapaian Target PNBPU Layanan LPMUKP, dan Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP.

Sebagai upaya mewujudkan sasaran program Setjen KKP, Pusdatin menetapkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan turunan dari Rencana Kerja Setjen pada program Dukungan Manajemen, antara lain kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan. Dalam penetapan Perjanjian Kinerja Pusdatin perlu adanya penetapan sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan serta terwujudnya data yang lengkap, akurat dan mutakhir
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara mutakhir, tepat, cepat dan efisien serta mewujudkan Sistem Pemerintahan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian.

Selain tujuan diatas, Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan, antara lain:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan; dan
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data dan Informasi.

2.2 Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Dukungan Manajemen”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 (satu) DIPA pada masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum. Dalam memenuhi sasaran, Pusdatin mempunyai Klasifikasi Rincian Output (KRO), antara lain:

1. Data dan Informasi
2. Sistem Informasi Pemerintahan
3. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

Sasaran kegiatan diatas diuraikan ke dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon I. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2026, berikut adalah indikator kinerja pada Pusat Data dan Informasi Tahun 2026:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2026

Sasaran Kinerja		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2026
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	92

Sasaran Kinerja		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2026
	Baik Lingkup Pusat, Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,6
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	78
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,3
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	78
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	92
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,1
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	65
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial KKP (nilai)	2,75
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,65
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,9
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,7
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87,2
		16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		17.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	82,5
		18.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	86
		19.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi

Sub bab ini menginformasikan tindak lanjut dari rekomendasi pada tahun sebelumnya, yaitu Pusat Data dan Informasi, agar melakukan upaya antara lain: 1) Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan; 2) Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan; 3) Monitoring pelaksanaan kegiatan per Kelompok Tim Kerja lingkup Pusdatin, melalui dialog kinerja setiap minggu sekali (pada hari Senin, pada saat apel pagi), agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan; dan 4) Menyusun Rencana Aksi Tahun 2026 dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026 beserta bukti dukung hasil evaluasi rencana aksi.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya, Pusdatin telah melakukan tindak lanjut dari triwulan IV tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan melalui kegiatan-kegiatan pendukung pada 8 (delapan) Tim Kerja lingkup Pusdatin dan terdapat beberapa perubahan anggota tim kerja disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah 99,93%.
- c. Monitoring pelaksanaan kegiatan per Kelompok Tim Kerja lingkup Pusdatin, melalui dialog kinerja setiap minggu sekali (pada hari Senin, pada saat apel pagi), agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 lingkup Pusdatin setiap triwulanan.

2.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2025

Penetapan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya. Berikut merupakan rincian pemanfaatan informasi Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025 dalam penetapan awal kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2026.

Tabel 7. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2025 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Pusat Data dan Informasi Tahun 2026

No.	Perjanjian Kinerja 2025			Perjanjian Kinerja 2026			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	91	98,46	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	92	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	3,5	4,41	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	3,6	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	77	98,52	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	78	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,2	3,99	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3,3	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	77	82,54	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	78	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	90	100	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92	-	IKU ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi			Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100	-	IKU ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)
8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	2	2,07	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	2,1	-	Target disusun berdasarkan Nota Dinas Pusddatin Nomor 3565/SJ.8/RC.610/X/2025 perihal Perubahan Nilai Target IKU Tingkat Kematangan Siber KKP tanggal 29 Oktober 2025 dikrenakan adanya perubahan instrument penilaian IKASANDI oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Perjanjian Kinerja 2025			Perjanjian Kinerja 2026			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	64,68	83,69	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	65	-	Target disusun berdasarkan Nota Dinas Pusdatin Nomor 3802/SJ.8/RC.610/XI/2025 perihal Penyampaian Target Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 tanggal 19 November 2025 dikarenakan adanya perubahan metodologi evaluasi dari assesment yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI)/Bappenas
10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3	3	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	3	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	2,7	2,73	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	2,75	-	Target disusun berdasarkan Memorandum Pusdatin Nomor 1603/SJ.8/RC.610/V/2025 kepada Biro Perencanaan mengenai perubahan target IKU ini Tahun 2025-2029.
12.	Indeks Pelayanan Publik KKP	4,60	4,80	Indeks Pelayanan Publik KKP	4,65	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	88,87	90,15	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	88,9	-	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	89,60	93,19	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	89,7	93,52	Target disusun berdasarkan capaian tahun 2025
15.	Nilai PM SAKIP Pusdatin	87	87,15	Nilai PM SAKIP Pusdatin	87,2	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan	100	100	-	-	-	Indikator kinerja ini tidak dicantumkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dikarenakan tidak

No.	Perjanjian Kinerja 2025			Perjanjian Kinerja 2026			Keterangan
	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
	Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan						adanya usulan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Pusdatin pada Tahun 2026
17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	100	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	82	87,85	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	82,5	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	85	100	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	86	100	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal
20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	95	99,93	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	95	-	Merupakan Indikator dan Target Mandatori Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

2.5 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2026, dan Perjanjian Kinerja Pusdatin 2026

Akuntabilitas Kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pada tahun 2026, berdasarkan **Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal KKP 2025-2029**, sasaran kinerja Pusat Data dan Informasi difokuskan pada **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, dan Informasi Kelautan dan Perikanan serta Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, dan Informasi**. Dan sebagai penguatan tata kelola data untuk mendukung kebijakan **Ekonomi Biru**. Untuk mewujudkan Sasaran Kinerja tersebut,

Pusdatin mempunyai 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dan merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 1 (satu) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Renstra KKP Tahun 2025–2029 mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan sebagai kerangka lintas kebijakan dan program. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029 meliputi pendekatan lintas kebijakan dan lintas fungsi untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Setjen selaras dengan arah pembangunan KKP. Melalui pengarusutamaan ini, Sekretariat Jenderal berperan memastikan bahwa seluruh dukungan manajemen dan tata kelola pembangunan secara konsisten mendukung pencapaian sasaran strategis KKP yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang terkait dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal, meliputi pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, Pusat Data dan Informasi, berkontribusi pada sasaran strategis dan indikator kinerja, yaitu:

Tabel 8. Indikator Kinerja Pusdatin pada Rencana Strategis KKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	92	93	94	95
	2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	77	78	79	80	81
	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	77	78	79	80	81
	6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	90	92	94	96	98
	7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	100	100	100	100
	8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
	9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	64,68	70	71	72	73
	10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	3	3	4	4
	11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,7	2,75	2,75	2,77	2,77
	12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
	13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,87	88,9	88,93	88,96	88,99
	14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,6	89,7	89,8	89,9	89,95
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87	87,2	87,4	87,6	87,8
	16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	100	100	100
	17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	100	100	100	100
	18.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	87	82,5	83	83,5	84
	19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	85	86	87	88	89

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)					
		20.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	95	95	95	95

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025-2029 menjadi acuan penetapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal dan Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin, dan rencana kerja Pusdatin yang tertuang pada kegiatan-kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Keselarasan Renstra Setjen Tahun 2025-2029, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Renstra Setjen 2025-2029	Renja Setjen 2026	PK Pusdatin 2026
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	92	92	92
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,6	3,6	3,6
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	78	78	78
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,3	3,3	3,3
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	78	78	78
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	92	92	92
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	100	100	100
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	3,1	2,1	2,1
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70	65	65
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	3	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	2,75	2,75

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Renstra Setjen 2025-2029	Renja Setjen 2026	PK Pusdatin 2026
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,65	4,65	4,65
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,9	88,9	88,9
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,7	89,7	89,7
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87,2	87,2	87,2
		16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	100	100
		17.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	82,5	82,5	82,5
		18.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	86	86	86
		19.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	95	95

Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2026 terdapat ketidaksamaan target dengan target pada Renstra Setjen 2025-2029 dan Rencana Kerja Setjen 2026, yaitu terdapat pada Indikator Kinerja *“Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan”* dikarenakan target menyesuaikan capaian tahun 2025 serta berdasarkan Nota Dinas Nomor 3802/SJ.8/RC.610/XI/2025 tanggal 19 November 2025 dengan perihal Penyampaian Target Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029, dan adanya perubahan metodologi evaluasi dari *assesment* yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI)/Bappenas. Selain itu target pada indikator kinerja *“Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP”* juga menyesuaikan capaian tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Pusdatin Nomor 3565/SJ.8/RC.610/X/2025 perihal Perubahan Nilai Target IKU Tingkat Kematangan Siber KKP tanggal 29 Oktober 2025 dikarenakan adanya perubahan instrumen penilaian IKASANDI oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

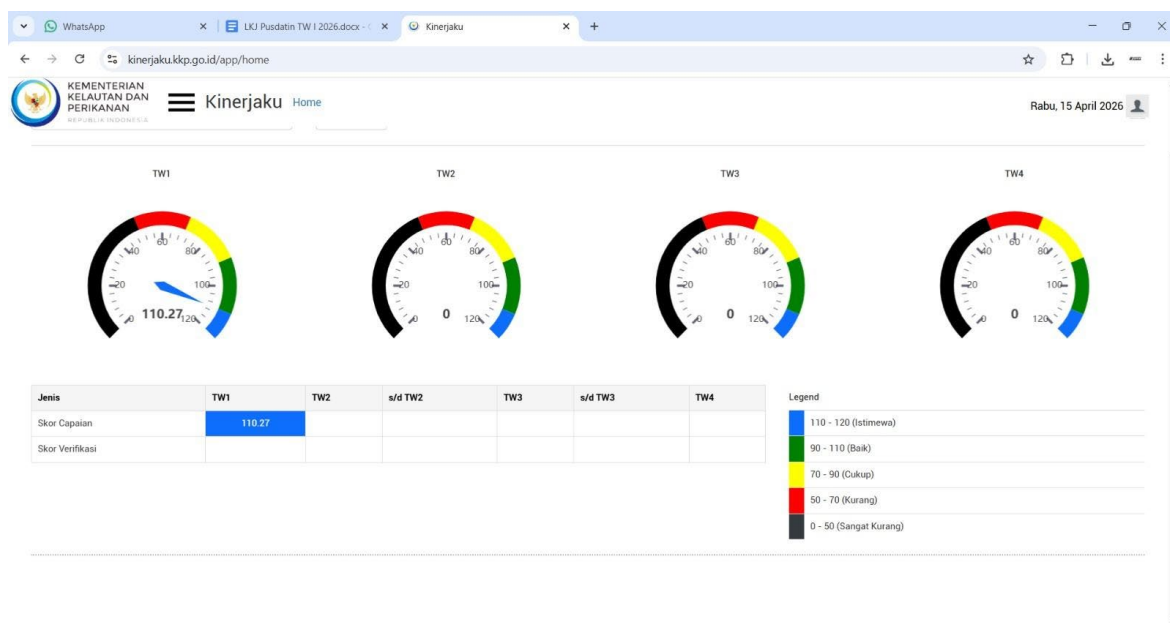
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP, yang diturunkan melalui visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP.

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pusat Data dan Informasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Tim Kerja di Pusat Data dan Informasi dengan didasarkan atas perjanjian kinerja yang telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun Nilai Kinerja Pusdatin periode Triwulan I Tahun 2026 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai **110,27** dengan predikat '**Istimewa**', dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026



Gambar 7. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian s/d Maret (%)	Keterangan
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	92	-	-	Capaian dihitung tahunan
		2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,6	-	-	Capaian dihitung tahunan
		3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	78	-	-	Capaian dihitung tahunan
		4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,3	-	-	Capaian dihitung tahunan
		5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	78	-	-	Capaian dihitung tahunan
		6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92	-	-	Capaian dihitung tahunan

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian s/d Maret (%)	Keterangan
			(persen)				
		7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	100	-	-	Capaian dihitung tahunan
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,1	-	-	Capaian dihitung tahunan
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	65	-	-	Capaian dihitung tahunan
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3	-	-	Capaian dihitung tahunan
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,75	-	-	Capaian dihitung tahunan
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,65	-	-	Capaian dihitung tahunan
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,9	-	-	Capaian dihitung tahunan
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	89,7	93,52	104,26	
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	87,2	-	-	Capaian dihitung tahunan
		16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	-	-	Capaian dihitung tahunan
		17.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	82,5	-	-	Capaian dihitung tahunan
		18.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	86	100,00	116,28	
		19.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	-	-	Capaian dihitung tahunan

3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan capaian kinerja, perlu dukungan anggaran, berikut disampaikan, capaian kinerja anggaran Pusdatin tahun anggaran 2025, yang dituangkan dalam rencana aksi.

Tabel 11. Capaian Kinerja Anggaran dalam Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN TW I 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	Pengelolaan Data dan Statistik	RO. Data dan Informasi	431.468.000	54.093.463	12,54%	
			Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta)				
			Percepatan Pendataan Kusuka				
			Validasi Nasional				
	2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi	RO. Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi	121.854.000	95.585.184	78,44%	
			Fasilitasi Layanan Aplikasi di Lingkungan KKP				
	3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	Pengelolaan Kendali Maritim	RO. Pengelola Kendali Maritim	135.928.000	-	-	
			Operasionalisasi Data Warehouse dan Analytics pada Integrated Maritime Intelligent Platform				
			Monitoring Kinerja Fitur Visualisasi Integrated Maritime Intelligent Platform di Command Center				
			Operasionalisasi Infrastruktur Command Center				
			Survey Layanan Pengelolaan Kendali Maritim				
	4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RO. Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi	-	-		Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Standarisasi Sistem

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN TW I 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(SPBE) KKP (indeks)	(SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi	Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dengan K/L terkait, dan Unit Eselon I KKP				Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi
	5 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi serta Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	RO. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin Pembentukan Tim Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Sosialisasi Penyusunan Proposal Inovasi Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik internal KKP Pemantauan dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik	1.716.744.000	625.177.668	36,42%	Anggaran menggunakan Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin dikarenakan kegiatan adalah kolaborasi antar tim Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap
	6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	RO. OP Sarana Data Citra Satelit Radar dan RO. Layanan Data Kelautan dan Perikanan OM Sarana Data Citra Satelit Radar Pengadaan Data Citra Satelit Radar	5.303.488.000	28.959.370	0,54%	
	7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	RO. Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP Survey Data Geospasial SDKP Diseminasi Data dan Informasi Geospasial	237.819.000	28.737.345	12,08%	
	8 Tingkat Kematangan Keamanan	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	RO. Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	547.612.000	29.897.712	5,46%	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN TW I 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penilaian Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian (IKASANDI) KKP				
	9	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	Pengelolaan Data dan Statistik	RO. Data dan Informasi			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Data dan Informasi
			Penilaian Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan				
	10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi	RO. Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi
			Fasilitasi Clearance Belanja TIK di Lingkungan KKP				
	11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	Pengelolaan Data dan Statistik	RO. Data dan Informasi			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Data dan Informasi
			Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) KKP				
	12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	RO. Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	377.364.000	4.760.000	1,26%
			Identifikasi lokus Organisasi Penyelenggara (OP) dan jenis layanan				
			Penyusunan SK Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)				
			Koordinasi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)				
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN TW I 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 3	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	RO. Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap
2	1 4	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	RO. Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap
	1 5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	Hukum, SDMA, Organisasi, dan Kinerja	RO. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin
	1 6	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	Program dan PHLN	RO. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN TW I 2026	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 7	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	Hukum, SDMA, Organisasi, dan Kinerja	RO. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin
				Peningkatan Kualitas SDM (Sertifikasi)			
	1 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	Program dan PHLN	RO. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin
				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Pelaporan Keuangan			
	1 9	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	Program dan PHLN	RO. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin			Anggaran sudah termasuk ke dalam RO Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin
				Pemantauan dan Rekonsiliasi Peyerapan Anggaran Pusdatin			

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin triwulan I tahun 2026 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

3.3.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Tingkat kepatuhan pengelolaan data (TKPD) kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional.

Data diambil dari pengisian kuesioner secara cacah lengkap dan sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya.

Terdapat 4 Variabel Perhitungan untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi Kusuka (X_1).
Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I pada laman satu data KKP (<https://portaldata.kkp.go.id>)
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X_2). Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi portal data KP dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.
3. Persentase Realisasi Persentase Tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang Terjamin Kualitasnya (X_3). Merupakan penilaian atas capaian realisasi penyelenggaraan informasi geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I dan Produsen Data. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.
4. Persentase Data Utama Statistik yang terkompilasi (X_4). Merupakan penilaian atas terhadap kompilasi Data Utama bentuk data statistik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diatur pada Keputusan Menteri KP Nomor 94 Tahun 2025 tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan digunakan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kompilasi data utama yang digunakan pada perhitungan ini adalah Data Utama dengan bentuk data Statistik. Penilaian atas capaian kompilasi Data Utama bentuk data statistik pada setiap unit kerja eselon I.

Perhitungan Persentase Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan, dengan rumus **Persentase TKPD : $X_1 + X_2 + X_3 + X_4$** .

3.3.1.2 Analisa Capaian

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
81,40	87,08	99,01	96,42	98,46	92	-	-	-	92	-	95	-

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.1.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan, pada triwulan I tahun 2026, Pusdatin melakukan upaya penyempurnaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta):
 - a. Penyepakatan IKU Geospasial 2026;
 - b. Memfasilitasi permohonan data geospasial ke Kementerian lain; dan
 - c. Melakukan manajemen kualitas IGT Habitat Bentik Laut Dangkal.
2. Pada Percepatan Pendataan Kusuka, Pusdatin telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi percepatan pendataan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) pada lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Malang dan Kabupaten Cirebon.
3. Capaian registrasi kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan (Kusuka) hingga triwulan I tahun 2026 sebanyak 2.182.092 Kusuka, terdiri atas Kusuka Badan Usaha sebesar 47.358

Badan Usaha, Kusuka Perseorangan sebanyak 2.083.427 Pelaku Usaha dan 51.307 Pelaku Pendukung. Capaian pendataan Kusuka triwulan I tahun 2026 sebesar 22.543 pelaku usaha atau meningkat sebesar 27,94 persen dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025.

4. Progres integrasi Kusuka dengan perizinan Silat dan Simkada dengan aplikasi XStar BPH Migas sudah mencapai 98 persen. KKP diharapkan terus memperbarui capaian proses pendataan KUSUKA agar lebih lengkap dan berkualitas, dengan fokus pendataan pada nelayan penerima BBM bersubsidi guna mendukung percepatan pendataan nelayan kapal di bawah 7 GT sesuai arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
5. Capaian produksi perikanan triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 7.030.132 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 2.419.006 ton dan perikanan budi daya sebesar 4.611.126 ton. Produksi perikanan triwulan IV tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,38 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2024 (*y on y*) dan meningkat sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025 (*q to q*). Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 18,96 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024 (*y on y*) dan meningkat 19,83 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025 (*q to q*). Sedangkan untuk produksi perikanan budi daya mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 7,78 persen dibandingkan triwulan III tahun 2024 (*y on y*) dan melambat 2,88 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025 (*q to q*). Kontribusi peningkatan produksi perikanan tangkap (*q to q*) berasal dari perikanan tangkap di laut sebesar 20,37 persen sedangkan untuk perikanan budi daya (*y on y*) berasal dari komoditas ikan sebesar 11,40 persen dan rumput laut sebesar 5,85 persen.
6. *Dashboard* pada portaldata.kkp.go.id sudah menampilkan profil KNMP, potensi desa tahun 2025, profil pelaku usaha yang tercatat Kusuka, dan data statistik lainnya yang sudah termutakhirkan (data PDB, NTN dan NTPI).

7. Penyusunan publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2026 sudah mencapai 80 persen sedangkan publikasi Analisis Indikator Kinerja Utama tahun 2026 sudah mencapai 60 persen diharapkan pertengahan April 2026 sudah selesai.
8. Pada tahun 2026, aplikasi Portal Data KKP diimplementasikan untuk kegiatan pendataan kelautan dan perikanan seluruh bidang kelautan dan perikanan.
9. Pusdatin juga memberikan dukungan berupa aplikasi pupuk bersubsidi yang mencatat penggunaan pelaku usaha pembudidaya ikan berdasarkan Kusuka terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi. Saat ini capaian tebus pupuk subsidi sudah mencapai 2.439 ton dengan 61.273 orang pelaku usaha.



Gambar 8. Koordinasi pendataan Kusuka di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon



Gambar 9. Koordinasi pendataan Kusuka di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk penyempurnaan Indikator Kinerja ini adalah:

1. Dalam Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta), Pusdatin akan melakukan:
 - a. Monitoring realisasi IKU Geospasial;
 - b. Menyampaikan Data Geospasial yang diperoleh dari Kementerian lain kepada Unit Kerja yang membutuhkan;
 - c. Melakukan manajemen kualitas untuk IGT yang telah diproduksi.
2. Untuk Percepatan Pendataan Kusuka tahun 2026, diperlukan:
 - a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis mengenai Kusuka kepada Pelaku Usaha KP secara daring dan luring (apabila tersedia anggaran;
 - b. Pembukaan Gerai Kusuka bekerjasama dengan K/L lainnya atau NGO.

3.3.1.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU TKPD, pagu anggaran pada Rincian Output Data dan Informasi senilai Rp431.468.000,-. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp54.093.463,- atau sebesar 12,54%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Geospasial (Satu Peta), Percepatan Pendataan KUSUKA, dan Validasi Nasional.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU TKPD didukung oleh Jabatan Fungsional Statistisi dan Surveyor Pemetaan. Pada Pusdatin, jumlah Jabatan Fungsional Statistisi saat ini sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Surveyor Pemetaan sebanyak 6 (enam) orang. Namun demikian, berdasarkan beban kerja yang ada, masih terdapat kekurangan SDM pada tahun 2025, yaitu sebanyak 5 (lima) orang Statistisi dan 3 (tiga) orang Surveyor Pemetaan.

3.3.2 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

3.3.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana aplikasi sistem informasi yang dikelola KKP mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, mudah diakses, dan bermanfaat bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan KKP.

Maksud dan tujuan dari survei layanan aplikasi sistem informasi adalah:

- a. Mengetahui kelemahan atau kelebihan layanan yang digunakan;
- b. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang digunakan;
- c. Sebagai bahan pengambilan Keputusan dan penetapan kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- d. Sebagai umpan balik (feedback) dalam memperbaiki layanan aplikasi.

Survei dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyebaran Kuesioner
Melakukan penyebaran kuesioner melalui Portal Collaboration Office untuk seluruh ASN KKP.
- b. Penyajian Data
- c. Survei yang telah diisi secara otomatis akan diolah dan dihitung oleh sistem untuk kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:
 - Nilai rata-rata per pertanyaan

Nilai masing-masing pertanyaan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, jumlah nilai masing-masing pertanyaan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

$$\text{Rata-rata Per Pertanyaan} = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi}}{\text{Jumlah responden}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei layanan aplikasi sistem informasi, maka penilaian diukur dengan Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju; Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju; Skor 3 untuk jawaban Netral; Skor 4 untuk jawaban Setuju; dan Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju. Skor persepsi terendah adalah 1 dan skor persepsi tertinggi adalah 5 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Ukuran Kinerja Penilaian Survei Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja Penilaian Pelayanan
1	≤ 1,9	Kurang
2	2 – 2,9	Cukup
3	3 – 3,9	Baik
4	4 – 4,5	Sangat Baik
5	4,6 – 5,00	Memuaskan

3.3.2.2 Analisa Capaian

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan											
Nama IKU		Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian	%	Target 2026	% Capaian Thdp	Target 2029	% Capaian Thdp	

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan											
Nama IKU	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
							Tahun 2026	Kenaikan Tahun 2025-2026		Target 2026		Target 2029
-	-	4,18	4,11	4,41	3,6	-	-	-	3,6	-	3,9	-

Indikator Kinerja Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.2.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung indikator kinerja Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi adalah:

1. Pusdatin terus berupaya meningkatkan layanan digital bagi pegawai. Salah satunya melalui pengembangan aplikasi *e-learning*, yang saat ini sudah dapat diakses melalui laman <https://emilea.kkp.go.id> untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri.
2. Terkait dengan aplikasi e-presensi yang terintegrasi dalam *SuperApps* KKP, saat ini masih dalam tahap uji coba dan telah digunakan oleh seluruh pegawai baik di pusat maupun daerah. Implementasi penuh aplikasi ini masih menunggu penerbitan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal KKP.
3. mendukung *campaign media management* melalui *SuperApps* KKP, khususnya dalam hal berbagi informasi, publikasi kegiatan, dan penyebaran konten positif institusi. Peran aktif kita semua sangat penting dalam membangun citra organisasi yang profesional dan terpercaya.
4. Pengembangan aplikasi Kinerjaku.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk penyempurnaan Indikator Kinerja ini adalah melakukan evaluasi dan rekonsiliasi aplikasi lingkup KKP.

3.3.2.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi, pagu awal anggaran pada Rincian Output Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi senilai Rp821.854.000 mengalami revisi menjadi senilai Rp121.854.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp95.585.184 atau sebesar 78,44%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitas Layanan Aplikasi di Lingkungan KKP.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi didukung oleh Jabatan Fungsional Pranata Komputer serta partisipasi seluruh pegawai dalam pengisian kuesioner Survei Layanan Aplikasi Sistem Informasi melalui Portal KKP.

Dalam kondisi efisiensi anggaran, Pusdatin tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit Eselon I dan pihak terkait, baik secara luring maupun daring (melalui rapat virtual).

Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Pusdatin saat ini sebanyak 42 orang. Berdasarkan beban kerja yang ada, dukungan SDM tersebut masih memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup Tim Kerja SPBE dan Aplikasi Sistem Informasi.

3.3.3 Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim

3.3.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim (PKM) KKP merupakan pusat kontrol dan pusat data terintegrasi untuk merespons kejadian di laut dan selanjutnya dapat digunakan sebagai rujukan pengambilan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Fasilitas ini berfokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit, penyiapan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan aktivitas

pemanfaatan ruang laut. PKM didukung dengan platform terintegrasi yang disebut *Integrated Maritime Intelligent Platform* (IMIP), yang dilengkapi 3 fitur utama yaitu *Monitoring*, *Alert*, dan *Dashboard*. Fitur *Monitoring* digunakan untuk memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS). Fitur *Alert* digunakan untuk mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat setiap indikator pelanggaran, seperti masa berlaku surat izin penangkapan ikan yang sudah habis, aktivitas pelanggaran penangkapan ikan seperti penangkapan ikan di kawasan konservasi dan penangkapan ikan di luar wilayah perizinan yang didaftarkan, serta pelanggaran kapal perikanan yang mematikan transponder VMS. Fitur *Dashboard* digunakan untuk menyajikan informasi produksi perikanan tangkap secara *real time* dan data citra satelit radar.

PKM menggunakan teknologi *data warehouse* yang merupakan sistem manajemen data yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber data dalam jumlah besar dengan sistem basis data terpusat. *Data warehouse* didesain untuk mendukung analisis data kompleks dan menyediakan data historis. Dengan struktur yang tepat, pengambil keputusan dapat menemukan pola, mengidentifikasi tren masa depan, dan membuat keputusan strategis berdasarkan kumpulan informasi yang diperoleh. *Data warehouse* PKM didukung dengan kapasitas penyimpanan data hingga ukuran *Petabyte* dan menyediakan akses data yang cepat dan mudah untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan.

3.3.3.2 Analisa Capaian

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim												
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
										Target 2026			
-	-	96,17	98,95	98,52	78	-	-	-	78	-	81	-	-

Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.3.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dalam rangka memastikan operasional Layanan Sistem Informasi PKM berjalan dengan baik, maka dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung kinerja layanan. Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Operasionalisasi *Data Warehouse* dan *Analytics* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:

a. Monitoring API *Data Warehouse Command Center*

Pada tahun 2026, PKM telah mengintegrasikan berbagai data dari Eselon I terkait ke dalam *Data Warehouse Command Center*, mulai dari data perizinan kapal perikanan (Izin SIPI/SIKPI, Kesatuan Usaha Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut, SKAT, SLO, SPB, STBLKK), PNB, *log book* penangkapan ikan, pelabuhan perikanan RIPN, sebaran kapal VMS, produksi perikanan tangkap PIPP, neraca komoditas, unit pengolahan ikan, pemasangan rumpon, sebaran perikanan, dan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan (SIAP MUTU). Mekanisme integrasi data tersebut dilakukan menggunakan *Application Programming Interface* (API) dengan sinkronisasi data secara *real time* dan otomatis.

Tabel 16. Nilai Kinerja API Command Center Triwulan I 2026

No	Bulan	Nilai Kinerja API Command Center (%)
1	Januari	100
2	Februari	100
3	Maret	100

Kegiatan monitoring kinerja layanan API Command Center dilakukan setiap hari kerja dimana berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026 terdapat 55 laporan monitoring API dengan rincian 20 laporan bulan Januari 2026, 18 laporan bulan Februari 2026, dan 17 laporan bulan Maret 2026. Dari hasil kegiatan monitoring pada periode tersebut, persentase layanan kinerja API *Command Center* sebesar 100%. Terdapat beberapa kendala downtime layanan kinerja API yang disebabkan adanya maintenance data center KKP, tetapi hal tersebut bisa di-*recovery* dengan cepat dalam hitungan kurang dari 1 jam.

- b. Koordinasi integrasi data dan *update* fitur dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP.

PKM telah melakukan rapat rutin dalam rangka koordinasi integrasi data dan update fitur pengawasan *Command Center* dengan Direktorat Pengendalian Operasi Armada DJPSDKP dan Tim Data Mega Solusi setiap minggu. Rapat tersebut membahas tentang usulan pengembangan aplikasi *Command Center* serta verifikasi data aplikasi *Command Center*.

- Pengembangan Aplikasi *Command Center* bertujuan untuk mengakomodir fitur baru dan integrasi data yang diajukan oleh Eselon I. Pada Triwulan I tahun 2026 terdapat 62 usulan pengembangan fitur aplikasi *Command Center*.
- Verifikasi data aplikasi *Command Center* bertujuan untuk memastikan semua fitur pada aplikasi *Command Center* berfungsi dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, PKM menggunakan platform Trello. Trello merupakan *platform*

project management dan kolaborasi yang membantu mengorganisasi serta memprioritaskan proyek dalam bentuk visual. Menggunakan sistem *card, board, dan list*. Trello memberikan individu dan tim kemudahan untuk mengatur pekerjaan secara jelas, menciptakan struktur untuk melihat tugas, deadline, prioritas, serta perkembangan proyek secara *real time*. Trello memberi tahu apa, siapa yang mengerjakan tugas tertentu, apa yang sedang dikerjakan, dan sejauh mana kemajuan tugas tersebut.

Pemanfaatan Trello dalam verifikasi data dilakukan secara kolaborasi antara pihak pengembang aplikasi dan tim verifikator dari PKM, mulai dari permintaan pengembangan fitur, penyampaian bugs dan status penanganannya hingga selesai dan berfungsi normal kembali. Berikut adalah tampilan Trello yang digunakan verifikasi data PKM yang terdiri dari 5 board yaitu Document Request, Feature Request, Sprint/Bugs, On Development, dan Ready for Review. Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat 19 card Trello yang dibuat dalam rangka verifikasi data aplikasi Command Center.

2. Monitoring Kinerja Fitur Visualisasi *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, PKM telah melaksanakan monitoring harian terhadap kinerja fitur aplikasi *Command Center*. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai standar layanan (SLA), mendukung kelancaran operasional, serta menyediakan data akurat bagi pengambilan keputusan manajemen.

Tabel 17. Jumlah Laporan Kinerja Visualisasi dan Nilai Kinerja Aplikasi IMI

No	Bulan	Jumlah Laporan Kinerja Visualisasi	Nilai Kinerja Aplikasi IMIP (%)
1	Januari	12	100
2	Februari	4	100
3	Maret	3	100

Kegiatan monitoring kinerja visualisasi PKM dilakukan setiap hari kerja dimana berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026 terdapat 19 laporan pengembangan kinerja visualisasi pada Aplikasi *Integrated Maritime Intelligent Platform*. Dari hasil kegiatan monitoring pada periode tersebut, persentase layanan kinerja visualisasi PKM sebesar 100%. Terdapat beberapa kendala downtime layanan kinerja visualisasi dari Eselon I yang disebabkan oleh beberapa hal seperti perawatan data center dan server data, tetapi hal tersebut bisa direcovery dengan cepat dalam hitungan kurang dari 1 jam.

Secara umum, indikator utama menunjukkan bahwa kinerja aplikasi *Command Center* sudah baik, meskipun terdapat beberapa *error/bugs* yang memerlukan perhatian khusus.

Seluruh *error/bug* yang terdeteksi melalui monitoring harian segera dilaporkan ke **tim pengembang** untuk ditindaklanjuti. Proses pelaporan dan tindak lanjut dilakukan melalui **Trello**, sehingga setiap kendala dapat dipantau progres penyelesaiannya secara transparan dan terstruktur. Adapun tahapan penanganannya yaitu:

- a. Error/bug dicatat oleh tim PKM dan dilaporkan ke tim pengembang melalui Trello.
- b. Status progres diperbaharui (*Sprint/Bugs* → *On Development* → *Ready to Review* → *Done*).
- c. Hasil perbaikan diverifikasi kembali oleh tim PKM.

Monitoring harian sepanjang Triwulan I tahun 2026 menunjukkan bahwa kinerja aplikasi secara umum stabil, dengan sebagian besar indikator SLA tercapai. Namun, adanya sejumlah error/bug menegaskan pentingnya koordinasi erat antara Tim DSS dan tim pengembang. Melalui mekanisme pelaporan di Trello dan pembahasan rutin dalam rapat, proses perbaikan dapat dipantau secara sistematis sehingga kualitas layanan aplikasi tetap terjaga.

3. Operasionalisasi Infrastruktur pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengoptimalkan fungsi *Command Center* sebagai pusat integrasi data dan pengambilan keputusan dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan. Pada Triwulan I Tahun 2026, pengelolaan operasional difokuskan pada pemeliharaan keberlanjutan layanan (*service continuity*) serta memastikan seluruh infrastruktur pendukung tetap berada dalam kondisi optimal untuk mendukung kegiatan monitoring dan koordinasi pimpinan.
- b. Secara umum, infrastruktur *Command Center* yang meliputi sistem visual, audio, dan jaringan masih berfungsi dengan baik dan mendukung operasional harian. Sistem visual yang terdiri dari *Video Wall* dan perangkat pendukung lainnya tetap menjadi komponen utama dalam penyajian data monitoring secara real-time. Sementara itu, infrastruktur audio dan jaringan berperan dalam memastikan komunikasi berjalan lancar serta mendukung konektivitas antar sistem tanpa gangguan yang signifikan.
- c. Berdasarkan hasil monitoring periode Januari hingga Maret 2026, capaian kinerja operasional perangkat tercatat masing-masing sebesar 90,91% pada bulan Januari, 90,00% pada bulan Februari, dan 77,27% pada bulan Maret. Perbedaan capaian ini dipengaruhi oleh adanya hari libur nasional serta cuti bersama, termasuk periode Hari Raya Idul Fitri, yang tetap terakumulasi dalam perhitungan sistem. Dengan mempertimbangkan hari kerja efektif, seluruh perangkat infrastruktur pada dasarnya berada dalam kondisi aktif dan berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan operasional yang signifikan.
- d. Secara keseluruhan, operasional *Command Center* pada Triwulan I 2026 tetap berjalan optimal dengan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi. Kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin mampu memastikan stabilitas sistem serta mendukung kebutuhan

operasional pimpinan. Ke depan, diperlukan penyempurnaan metode perhitungan kinerja dengan mempertimbangkan hari non-operasional agar capaian yang dihasilkan dapat lebih merepresentasikan kondisi riil di lapangan.



Gambar 10. Rapat Koordinasi Pengembangan dan Update Fitur Pengawasan Command Center

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Operasionalisasi *Data Warehouse* dan *Analytics* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:
 - a. Monitoring API *Data Warehouse Command Center*
 - b. Koordinasi integrasi data dan update fitur dengan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP
2. Operasionalisasi *Decision Support System* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center* dengan memonitoring pada Aplikasi *Trello* (*Task, Bug/Error* dan *Request*) dengan pihak penyedia aplikasi *Integrated Maritime Intelligent Platform*; dan
3. Operasionalisasi Infrastruktur pada *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*:
 - a. Pengembangan sistem monitoring terintegrasi berbasis dashboard real-time, yang mampu menampilkan status seluruh perangkat

(visual, audio, jaringan, dan kelistrikan) secara terpusat dan otomatis, sehingga meningkatkan kecepatan deteksi gangguan serta akurasi pelaporan.

- b. Implementasi *automated alerting system* (notifikasi dini) melalui integrasi dengan aplikasi komunikasi (*email/instant messaging*), sehingga setiap potensi gangguan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh tim teknis tanpa menunggu proses monitoring manual.
- c. Penyempurnaan metode perhitungan kinerja berbasis hari kerja efektif, dengan mengakomodasi hari libur nasional dan cuti bersama, agar capaian indikator kinerja lebih merepresentasikan kondisi operasional yang sebenarnya.
- d. Program penataan ulang infrastruktur pasif (*recabling dan labeling standar*) untuk meningkatkan efisiensi *troubleshooting*, mempercepat waktu penanganan gangguan (*Mean Time To Repair*), serta mendukung tata kelola infrastruktur yang lebih tertib dan profesional.
- e. Rencana peremajaan perangkat kritikal (*hardware renewal*) secara bertahap, khususnya pada komponen yang telah mengalami penurunan performa, guna menjaga keberlanjutan layanan dan mengurangi ketergantungan pada solusi sementara (*work around*).
- f. Peningkatan kapabilitas monitoring berbasis *log* dan *history performa*, sehingga memungkinkan analisis tren jangka panjang, prediksi potensi gangguan, serta penyusunan strategi pemeliharaan preventif yang lebih efektif.
- g. Penguatan dukungan terhadap operasional *hybrid meeting*, melalui optimalisasi perangkat audio-visual dan jaringan, guna memastikan kualitas komunikasi yang stabil dan profesional dalam berbagai skenario kegiatan pimpinan.

3.3.3.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim, pagu anggaran pada Rincian *Output* Pengelola Kendali Maritim senilai Rp14.135.928.000 dengan pagu revisi senilai Rp135.928.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp0 atau sebesar 0%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Operasionalisasi Data *Warehouse* dan *Analytics* pada *Integrated Maritime Intelligent Platform*, Monitoring Kinerja Fitur Visualisasi *Integrated Maritime Intelligent Platform* di *Command Center*, Operasionalisasi Infrastruktur *Command Center*, dan *Survey* Layanan Pengelolaan Kendali Maritim.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim didukung oleh Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang saat ini berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan berbagai jenjang, dengan beban kerja yang ada saat ini, kebutuhannya telah mencukupi.

3.3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)

3.3.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Indeks SPBE KKP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE secara menyeluruh di lingkungan KKP. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah diimplementasikan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung tata Kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Pengukuran Indeks SPBE dilakukan berdasarkan kerangka evaluasi nasional yang mencakup beberapa domain utama, yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, serta aspek audit, dan pengawasan. Setiap domain tersebut terdiri dari indikator-indikator yang menilai kebijakan, kelembagaan, proses bisnis, layanan digital, serta tingkat integrasi sistem informasi yang ada di dalam organisasi.

Dalam kerangka RB, Indeks SPBE memiliki keterkaitan erat dengan beberapa indikator penilaian, antara lain *Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE*, *Tingkat Kematangan Proses Bisnis*, serta *Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital*. Oleh karena itu, capaian Indeks SPBE tidak hanya menggambarkan kondisi teknis sistem informasi, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola, integrasi layanan, serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program digital di lingkungan KKP.

Pengukuran Indeks SPBE dilakukan berdasarkan evaluasi nasional yang mencakup domain tata kelola, manajemen, layanan, serta audit SPBE. Hasil pengukuran ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat kematangan implementasi SPBE (*maturity level*), yang menjadi salah satu parameter penting dalam penilaian RB. Semakin tinggi tingkat kematangan SPBE, maka semakin tinggi pula kontribusinya terhadap peningkatan nilai RB, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

3.3.4.2 Analisa Capaian

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks SPBE KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Targe t 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
4,26	4,24	4,71	3,99	3,99	3,3	-	-	-	3,3	-	3,6	-

Indikator Kinerja Indeks SPBE KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB), sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.4.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Menyampaikan Nota Dinas Nomor 433/SJ.8/TU.110/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 dan Nomor 542/SJ.8/TU.110/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Permintaan Nama Anggota Tim pada Unit Kerja SPBE KKP Tahun 2026, sebagai materi penyusunan Kepmen Tim Koordinasi SPBE KKP tahun 2026;
2. Menyampaikan draft Kepmenkp tentang Tim Koordinasi SPBE KKP Tahun 2026 ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Nomor 1019/SJ.8/HK.160/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal : Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
3. Melakukan Audiensi dengan Dinas Komdigi Provinsi Jawa Barat terkait Penerapan SPBE khususnya Domain Kebijakan dan Tata Kelola.



Gambar 11. Audiensi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Kebijakan dan Tata Kelola

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja

ini adalah:

1. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan KKP Tahun 2026;
2. Pembahasan Draft Keputusan Menteri KP tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) SPBE; dan
3. Pengumpulan Data Dukung Indeks SPBE.

3.3.4.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP, pagu awal anggaran pada Rincian Output Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi senilai Rp821.854.000 mengalami revisi menjadi Rp121.854.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp95.585.184 atau sebesar 78,44%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dengan K/L terkait, dan Unit Eselon I KKP.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU ini didukung oleh Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan berbagai jenjang, dengan beban kerja yang ada saat ini, kebutuhannya telah mencukupi.

3.3.5 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

3.3.5.1 Definisi Indikator Kinerja

Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada dengan kriteria:

1. Memiliki Kebaruan

2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

3.3.5.2 Analisa Capaian

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP												
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029	
-	-	82,93	80,78	82,54	78	-	-	-	78	-	81	-	

Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian internal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Meskipun capaian tahun sebelumnya cukup tinggi, penetapan target Tahun 2026 tidak dinaikkan secara signifikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam perencanaan kinerja, dengan memperhatikan potensi dinamika pelaksanaan program, keterbatasan sumber daya, serta upaya menjaga keberlanjutan dan kualitas inovasi pelayanan publik. Oleh karena itu, target Tahun 2026 disusun dengan pendekatan baseline kinerja yang lebih stabil, sehingga tetap mendorong peningkatan kinerja secara bertahap sekaligus memastikan konsistensi dan kualitas inovasi yang dihasilkan. Dengan demikian, kenaikan target dari 77 menjadi 78 mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan (continuous improvement) tanpa mengabaikan aspek kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

3.3.5.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP adalah:

- a. Pembahasan IKU Inovasi Pelayanan Publik 2026 dengan Eselon I terkait pada tanggal 13 Januari 2026;
- b. Penyampaian Nota Dinas Nomor 190/SJ.8/TU.210/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2026 kepada Eselon I KKP;
- c. Penyampaian Nota Dinas Nomor B.991/SJ.8/TU.110/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Permintaan Nama Anggota Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP;
- d. Pendampingan kenaikan pangkat luar biasa dan keikutsertaan dalam *OECD Call for Government Innovation* Tahun 2026 untuk publikasi dan promosi pada tingkat internasional dengan batas waktu pengajuan adalah 31 Maret 2026 bagi inovator yang mendapatkan mendapat penghargaan sebagai *Oustanding Public Service Innovations* Kelompok Umum Tahun 2025 oleh KEMENPANRB; dan
- e. Penyusunan Draft SK Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik.



Gambar 12. Pembahasan IKU Inovasi Pelayanan Publik 2026

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Penetapan SK Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik yang rencananya akan ditetapkan pada Triwulan II;
2. Sosialisasi Penyusunan Proposal Inovasi kepada Eselon I terkait lingkup KKP; dan
3. Pendampingan pada Eselon I lingkup KKP terkait penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2026.

3.3.5.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Pembentukan Tim Penilaian Inovasi Pelayanan Publik, Sosialisasi Penyusunan Proposal Inovasi, Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik internal KKP, Pemantauan dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik, dalam dukungan anggaran indikator ini tidak tercantum di dalam RKAKL. Alokasi untuk mendukung kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Layanan Umum (Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin) yang digunakan juga untuk membiayai operasional dengan alokasi anggaran awal senilai Rp2.198.744.000,- dengan anggaran efektif yang dapat digunakan senilai Rp1.716.744.000,- dengan realisasi senilai Rp625.177.668,- (36,42%).

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU ini didukung oleh kolaborasi antar tim kerja Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi serta Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dengan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Penata Perizinan dengan berbagai jenjang, dengan beban kerja yang ada saat ini, kebutuhannya telah mencukupi. Dalam mendukung IKU ini juga melibatkan Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik dari Eselon I terkait yang dimana SK Tim sedang dalam tahap penyusunan.

3.3.6 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3.3.6.1 Definisi Indikator Kinerja

Sebagai upaya memenuhi IKU ini BPISDKP, mempunyai fasilitas stasiun penerima data satelit radar BARATA, untuk melakukan akuisisi data citra satelit radar *Cosmo-Skymed Constellation* dan *Cosmo-Skymed Second Generation*. Data-data tersebut kemudian dikelola dan diolah menjadi data dan/atau informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Proses pengelolaan data meliputi tahap pemesanan, akuisisi, pengolahan dan analisis data dengan peruntukan pemantauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan cara menghitung pembagian antara data citra satelit yang digunakan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan selama 2026 dan data citra satelit yang diakuisisi oleh BPISDKP selama 2026 dikalikan 100 persen. Target pada tahun 2026 adalah 92% dengan periode pengukuran tahunan..

3.3.6.2 Analisa Capaian

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	100	90	100	92	-	-	-	92	-	98	-

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.6.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Guna mendukung pencapaian IKU, BPISDKP melaksanakan kegiatan:

1. Berhasil mengakuisisi 78 scene data radar COSMO-SkyMed;
2. Data didistribusikan dalam format Original, QLK, dan Stretched-Georeferenced;
3. Terdapat kendala status *rejected/canceled order* sehingga perlu pemesanan ulang;
4. Analisis masih menggunakan metode delineasi manual berbasis *shapefile* KKPRL;
5. Citra radar efektif mendeteksi objek keras dan aktivitas hingga kedalaman 4–5 meter; dan
6. BPISDKP memiliki kuota sebanyak 64 scene citra satelit radar pada tahun anggaran 2026, dengan jadwal akuisisi antara Agustus hingga November 2026.

Hasil integrasi data KKPRL pada portal *command center* telah berjalan dengan baik. Telah berhasil mengintegrasikan data hasil deliniasi citra radar *Cosmo-*

SkyMed pada lokasi pemantauan KKPRL. Data tersebut dapat diakses berdasarkan ID perizinan yang telah diterbitkan. Namun demikian, data dalam format raster belum dapat ditampilkan karena ukuran file yang cukup besar. Satuan Kerja yang memerlukan akses data radar satelit melalui portal *Command Center* dapat menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Citra satelit radar sangat efektif untuk mendeteksi objek bermaterial keras, seperti batu atau besi. Akan tetapi, teknologi ini kurang optimal untuk mendeteksi material organik, misalnya pagar laut berbahan bambu di kawasan lahan basah. Hasil analisis citra satelit radar umumnya memberikan gambaran secara makro. Dalam kondisi tertentu, penggunaan drone dapat menjadi alternatif yang lebih efisien, selain dari segi biaya yang relatif lebih terjangkau.

BPISDKP telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak e-GOES, selaku pemegang hak eksklusif komersial untuk penjualan dan distribusi data radar COSMO-SkyMed, untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Data Citra Satelit Radar Dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi” tahun anggaran 2026. Hasil komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan dokumen rancangan kontrak pengadaan terkait pengadaan data citra satelit radar. Subtansi rencana kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak (surat perjanjian). Ruang lingkup kegiatan pengadaan data citra satelit radar yaitu penyediaan 64 (enam puluh empat) scenes data citra radar Spotlight-2 (COSMO-SkyMED/CSK) atau Spotlight-2C (COSMO-Skymed 2nd Generation/ CSG) dengan luasan satu scene minimal 5 (lima) km x 10 (sepuluh) km dan ketelitian spasial minimal 5 (lima) meter. Ruang lingkup kegiatan pengadaan belanja suku cadang yaitu penyediaan komponen suku cadang antenna untuk mengembalikan fungsionalitas antenna berupa 1 (satu) unit gearbox sumbu-x dan 1 (satu) unit kabel data/tracking. Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan sistem stasiun bumi yaitu Pengadaan Data Citra Satelit Radar Dan Pemeliharaan Operasional Stasiun Bumi berupa:

1. Pemeliharaan sistem antena penerima data radar yang meliputi pemeliharaan sistem perangkat lunak dan sistem mekanik antena selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
2. Pemeliharaan sistem pemesanan data radar meliputi pemeliharaan pada sistem COSMO Customer User Terminal (CUT) selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
3. Pemeliharaan sistem dan penyediaan lisensi temporer untuk pengolahan dan penganalisaan data radar meliputi *Smart Eyes on the Seas* (SEonSE) Portal dan Engine selama 60 (enam puluh) hari kalender;
4. Penyediaan komponen mekanikal antena untuk mengembalikan fungsionalitas antena, terdiri dari *gearbox* sumbu-y, *dehydrator*, *cable set encoder*, *encoder*, dan *stow pin*.

Selanjutnya akan dilakukan revidi dokumen pengadaan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Inspektorat sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Diharapkan perjanjian kontrak dapat ditanda tangani pada awal Bulan Mei 2026. BPISDKP juga telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terkait kegiatan ini pada platform SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Langkah ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.

Adapun kendala yang dihadapi adalah perangkat *Station Computer Center* (SCC) mengalami insiden setelah terjadi pemadaman listrik. Gangguan tersebut diduga disebabkan oleh kinerja *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di ruang server BARATA yang sudah tidak optimal. Akibatnya perangkat SCC mengalami kegagalan masuk sistem operasi (*Operating System/OS*). Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan dengan pendampingan dari teknisi eGEOS (Bruno Santantonio). Pada tanggal 2 April 2026 Perangkat yang mengontrol fungsi sistem antena ini berhasil kembali beroperasi namun belum dilakukan uji kinerja mengingat kondisi antena masih dalam perbaikan.

3.3.6.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Rincian *Output* (RO):

1. OP Sarana Data Citra Satelit Radar dengan kegiatan OM Sarana Data Citra Satelit Radar dengan anggaran senilai Rp3.025.408.000 dan telah terealisasi senilai Rp0, hal ini disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi pada pihak penyedia sehingga mengakibatkan pergantian PIC proyek yang berkoordinasi dengan KKP. Hal ini berdampak pada perlunya penyesuaian mekanisme kerja serta pola komunikasi antara kedua belah pihak; dan
2. Layanan Data Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Pengadaan Data Citra Satelit Radar dengan anggaran senilai Rp2.278.080.000 dan telah terealisasi senilai Rp28.959.370 (1,27%).

Alokasi anggaran ini terdapat pada DIPA Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Perikanan (BPISDKP). Serta terdapat dukungan SDM dengan berbagai pemangku jabatan fungsional seperti Pranata Komputer, Analis Data Ilmiah, dan Analis Kebijakan.

3.3.7 Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3.3.7.1 Definisi Indikator Kinerja

BPISDKP melalui Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Geospasial, telah melakukan kegiatan pengolahan data, analisis data, dan penyebarluasan informasi geospasial kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Adapun tematik data yang dikelola meliputi sebaran tumpahan minyak di Perairan Bintan dan sekitarnya; lahan pembudidayaan ikan di Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, dan Riau; perubahan pemanfaatan wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat; perubahan garis pantai di Pulau Sulawesi; monitoring pemutihan karang di perairan Selat Lombok; serta peta perkiraan daerah penangkapan ikan. Sedangkan kegiatan survey data geospasial tidak dapat dilaksanakan imbas efisiensi anggaran.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui perbandingan antara permintaan informasi geospasial yang telah berhasil dipenuhi BPISDKP selama 2025 dengan permintaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan ke BPISDKP selama 2026 ini. Target yang diharapkan pada tahun 2026 adalah 100% dari permintaan informasi geospasial yang dihasilkan BPISDKP. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan yang berarti capaian akan diukur pada akhir tahun.

3.3.7.2 Analisa Capaian

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	100	100	100	100	-	-	-	100	-	100	-

IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.7.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Hingga Maret 2026, upaya perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu:

1. Pemantauan tumpahan minyak ini menggunakan data radar dari satelit Sentinel-1 level 1 dengan mode *Interferometric Wide swath (IW)*, *High resolution Ground Range Detected (GRDH)*, lebar cakupan data adalah 250 km dengan resolusi spasial 5m x 20m. Data yang digunakan pada kajian ini adalah data harian pada bulan Desember 2025 sampai Februari 2026 dan diperoleh dari Copernicus Browser,

<https://browser.dataspace.copernicus.eu/>.

Berdasarkan hasil pengolahan data selama periode Desember 2025 hingga Februari 2026, terdapat 45 data citra yang dianalisis dan menghasilkan 27 kejadian tumpahan minyak. Secara temporal, jumlah kejadian menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada bulan Februari 2026. Pada bulan Desember 2025, dari 18 data yang dianalisis, teridentifikasi 6 kejadian tumpahan minyak. Jumlah ini menurun pada Januari 2026 menjadi 5 kejadian dari 14 data. Namun, pada Februari 2026 terjadi peningkatan signifikan dengan 16 kejadian dari 13 data yang dianalisis, menjadikannya bulan dengan frekuensi kejadian tertinggi. Peningkatan jumlah kejadian pada Februari mengindikasikan adanya pengaruh faktor lingkungan, seperti kondisi musim (angin utara), dinamika arus, maupun intensitas aktivitas pelayaran. Hal ini menunjukkan bahwa periode tersebut merupakan waktu yang lebih rentan terhadap kejadian tumpahan minyak di wilayah kajian;

2. Recovery sistem otomasi PPDPI masih berada pada tahap pengembangan (*development*) dan finalisasi sistem. Secara teknis, sistem yang dikembangkan telah mampu menjalankan beberapa proses utama, antara lain: pengunduhan dan pengolahan data satelit, generasi front suhu dan klorofil-a, generasi titik DPI, hingga visualisasi layout peta DPI. Adapun tahapan yang masih dalam proses penyelesaian meliputi visualisasi layout tabel titik DPI dan implementasi penjadwalan otomatis menggunakan crontab. Diharapkan pada awal Triwulan 2, sistem otomasi PPDPI dapat kembali dioperasikan secara rutin setiap hari dan disebarluaskan kembali kepada masyarakat melalui portal informasi;
3. Analisis perubahan pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan dengan pendekatan perubahan pemanfaatan wilayah pesisir berdasarkan observasi dari citra satelit optis Sentinel-2 dengan resolusi spasial 10 m. Wilayah Pesisir Jawa Timur dibagi dalam tiles berukuran 0.125° mencakup seluruh garis pantai provinsi tersebut, sehingga diperoleh 165 tiles yang meliputi dua puluh dua kabupaten/kota. Selama periode triwulan 1 (Januari – Maret 2026), telah diselesaikan proses download

dan pengolahan data-data sentinel-2 menjadi komposit enam bulanan untuk 30 (tiga puluh) tiles;

4. Otomasi Proses Pengolahan Data Indikator Pemutihan Karang Telah dilakukan kolaborasi dengan pemegang untuk menyusun otomasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan data indikator pemutihan karang. Proses otomasi cukup membantu dalam mempermudah dan mempersingkat waktu pengolahan data dibandingkan proses sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Otomasi disusun berbasis pada pemograman python pada platform Google Colab yang dapat diakses melalui tautan berikut NOAA_CRW_Server_Otomasi.ipynb - Colab;
5. Otomasi deteksi bangunan laut merupakan wujud pemanfaatan teknologi dalam mengidentifikasi objek bangunan di atas permukaan laut secara lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, citra satelit, dan pendekatan komputasi, proses identifikasi struktur bangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sistematis. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sentinel-2 Deep Resolution (S2DR4)*, yaitu model berbasis *deep learning* yang mampu meningkatkan resolusi spasial citra Sentinel-2 dari 10–20 meter menjadi hingga mendekati 1 meter. Pada tahap awal implementasi, proses ini dilakukan pada wilayah pesisir sekitar Kuta, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar yang dibagi menjadi 15 grid berukuran 4×4 km. Rentang data citra yang digunakan berada pada periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026;
6. Pelaksanaan kegiatan survei hingga periode Triwulan I difokuskan pada tahapan pengolahan data, post-processing, dan validasi model PPDPI secara on-desk sebagai bagian dari validasi internal. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan konsistensi hasil model serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Seluruh kegiatan pada periode ini dilaksanakan berbasis data sekunder dan hasil pemodelan, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini mempertimbangkan

karakteristik fenomena oseanografi yang dinamis serta keterbatasan pelaksanaan survei lapangan dari aspek waktu, sumber daya, dan biaya;

7. Revitalisasi aplikasi daerah penangkapan ikan pada periode Triwulan I tahun 2026, telah dilakukan tahapan awal pelaksanaan kegiatan revitalisasi melalui proses penyusunan kelengkapan dokumen pengadaan kegiatan revitalisasi dan pemeliharaan aplikasi DPI BPISDKP. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, telah dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Intergra Inovasi Indonesia, selaku pihak pengembang, serta dilanjutkan dengan kegiatan *kick-off meeting*.

Sampai dengan penilaian dan evaluasi periode triwulan I belum terdapat kendala yang dihadapi, akan tetapi sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kedepannya akan dilaksanakan survei lapangan untuk validasi dan verifikasi data. Selain itu, terdapat penyesuaian perencanaan kegiatan dan penganggaran secara bertahap agar survei lapangan dapat dilaksanakan. Penguatan perencanaan teknis terus dilakukan guna mempercepat pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

3.3.7.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terpenuhi melalui alokasi anggaran pada Rincian *Output* (RO) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP, Survey Data Geospasial SDKP, dan Diseminasi Data dan Informasi Geospasial dengan pagu efektif senilai Rp237.819.000 sedangkan realisasi per 31 Maret 2026 senilai Rp28.737.345 atau 12,08% (anggaran ini terdapat pada DIPA Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Perikanan). Dukungan Sumber Daya Manusia untuk IKU dimaksud saat ini terdapat pemangku jabatan fungsional Surveyor Pemetaan.

3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

3.3.8.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja tingkat kematangan keamanan siber dan persandian memiliki dua bagian pengukuran, yaitu pengukuran indikator tingkat kematangan keamanan siber dan pengukuran indikator tingkat kematangan persandian. Tingkat Kematangan Keamanan Siber merupakan indikator yang mendeskripsikan tingkat kesiapan dan kemampuan sebuah organisasi untuk melindungi aset informasinya dari serangan siber, serta menilai efektivitas dari personil, proses, dan teknologi yang diterapkan. Indikator ini berguna untuk menunjukkan sejauh mana pendekatan organisasi dalam menghadapi insiden siber telah bergerak dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dan strategis. Selain itu, indikator ini juga dapat membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai tingkat kematangan keamanan siber yang lebih tinggi. Secara teknis, Indikator Tingkat Kematangan Keamanan Siber didefinisikan sebagai nilai komposit yang mencerminkan sejauh mana organisasi telah menerapkan kontrol keamanan siber secara sistematis, terdokumentasi, konsisten, dan berkelanjutan. Nilai ini mencakup empat domain utama, yaitu: Identifikasi, Proteksi, Deteksi, serta Penanggulangan dan Pemulihan. Masing-masing domain memiliki bobot yang berbeda dalam perhitungan akhir: Identifikasi (25%), Proteksi (30%), Deteksi (25%), serta Penanggulangan dan Pemulihan (20%).

Indikator Tingkat Kematangan Persandian didefinisikan sebagai nilai komposit yang menggambarkan kematangan penerapan kegiatan persandian di lingkungan organisasi. Kegiatan persandian meliputi penerapan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Indikator ini mencakup lima area evaluasi: Kebijakan Pengamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya, Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi non-Elektronik, Layanan Keamanan Informasi, serta Pola Hubungan Komunikasi Sandi. Pengukurannya didasarkan pada standar dan regulasi nasional yang berlaku.

Pada Agustus 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan sosialisasi terkait instrumen penilaian tingkat kematangan keamanan siber dan sandi terbaru yang harus diterapkan oleh organisasi atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yaitu IKASANDI v2.1. Berbeda dengan instrumen yang digunakan sebelumnya, IKASANDI v2.1 memiliki dua bagian pengukuran: Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kematangan Persandian. Instrumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber (untuk bagian keamanan siber), serta Peraturan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2023 (untuk bagian persandian). IKASANDI merupakan hasil pemetaan dari berbagai instrumen pengukuran yang ada di BSSN. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengukur PSE Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yang memiliki kategori Strategis sesuai Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023, maupun PSE non-IIV yang memiliki kategori non-Strategis. Dengan instrumen ini, diharapkan kondisi kematangan keamanan siber dan sandi pada kementerian/lembaga dapat digambarkan secara lebih menyeluruh dan mendalam, sehingga membantu proses pembinaan secara terstruktur dan terarah.

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian dilaksanakan melalui metode wawancara terstruktur menggunakan instrumen berupa kuesioner. Sebelum wawancara dilakukan, organisasi terlebih dahulu diminta untuk menentukan kategori Sistem Elektronik (SE) yang dikelolanya, karena jumlah kontrol yang akan dinilai bergantung pada kategori tersebut. Berdasarkan hasil kategorisasi, Sistem Elektronik di lingkungan KKP tergolong ke dalam kategori Tinggi. Dengan demikian, jumlah kontrol yang digunakan sebagai indikator penilaian adalah 163 kontrol keamanan siber dan 39 kontrol persandian.

Pengukuran indeks dilakukan setiap tahun melalui mekanisme dua tahap:

1. Tahap pertama: Pengisian mandiri instrumen IKASANDI oleh tim Pusdatin yang melibatkan seluruh unit kerja terkait.

2. Tahap kedua: Verifikasi oleh BSSN atau auditor internal yang memiliki kompetensi setara. Skor akhir ditetapkan berdasarkan kesesuaian antara jawaban mandiri dengan bukti dukung (dokumen, wawancara, observasi).

Kedua indikator (keamanan siber dan persandian) diukur menggunakan skala 0 hingga 5, yang selanjutnya dikonversi ke dalam lima level kematangan. Tabel berikut menjelaskan masing-masing level beserta kriteria indeksnya.

Tabel 22. Level Kematangan dan Rentang Indeks IKASANDI

Level	Nama Level	Rentang Indeks	Kriteria Indeks
1	Awal (<i>Initial</i>)	0 - 1,50	Implementasi awal, informal, tidak konsisten, belum ada dokumen
2	Berulang (<i>Repeatable</i>)	1,51 - 2,50	Prosedur terorganisir namun informal, dokumen disusun belum ditetapkan
3	Terdefinisi (<i>Defined</i>)	2,51 - 3,50	Prosedur formal, berulang namun belum konsisten, dokumen ditetapkan
4	Terkelola (<i>Managed</i>)	3,51 - 4,50	Penerapan formal, konsisten, direviu berkala, dokumen ditetapkan
5	Inovatif (<i>Innovative</i>)	4,51 - 5,00	Terkelola baik, terintegrasi, otomatisasi, menjadi budaya organisasi

sumber: Instrumen IKASANDI BSSN, diolah

3.3.8.2 Analisa Capaian

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2025				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 206	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	3,08	3,40	2,07	2,1	-	-	-	2,1	-	2,4	-

Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan dan merupakan hasil

penilaian eksternal oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.8.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Dalam rangka mendukung IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian KKP, pada triwulan I tahun 2026, Pusdatin melakukan upaya penyempurnaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pembahasan Draft Keputusan Menteri Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan audit, manajemen risiko, serta perlindungan data pribadi yang selaras dengan regulasi nasional dari BSSN dan undang-undang terkait. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa ruang lingkup kebijakan ini mencakup 19 bab, mulai dari peran tim SMKI, penggunaan kriptografi, hingga mekanisme evaluasi berkelanjutan.

Selain menyepakati struktur regulasi, rapat tersebut juga menetapkan langkah strategis bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai proyek percontohan untuk instrumen kematangan keamanan siber nasional tahun 2026. Sebagai tindak lanjut, Pusdatin akan segera melakukan inventarisasi aset informasi secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan peta rencana keamanan dan daftar risiko (*risk register*). Proses ini juga akan melibatkan Inspektorat Jenderal guna memastikan seluruh standar audit terpenuhi dan penyempurnaan rancangan aturan dapat segera diselesaikan.



Gambar 13. Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) KKP

2. Melakukan Studi Banding Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 9 hingga 10 Maret 2026;



Gambar 14. Studi Banding Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ke BSSN

Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan standar nasional yang dikelola oleh BSSN. Dalam diskusi tersebut, BSSN memberikan masukan strategis mengenai struktur tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, serta pentingnya pemenuhan standar teknis guna melindungi aset digital pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pusdatin KKP berencana melakukan penguatan infrastruktur keamanan dengan mengembangkan Pusat Operasi Keamanan Siber (SOC) yang terintegrasi. Selain aspek teknis, perlu juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan informasi. Evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi melalui instrumen penilaian berkala dan audit sistem akan terus dilakukan untuk

memastikan implementasi SMKI di lingkungan KKP berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh akun VPN KKP dalam rangka penguatan pengelolaan hak akses serta pemenuhan standar ISO 27001 dan IKASANDI. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pusdatin juga telah melakukan sosialisasi layanan update VPN (dari SSL-VPN menjadi IPSEC-VPN) ke seluruh *user* lingkup KKP pada tanggal 10 Februari 2026 serta menyediakan layanan helpdesk Keamanan Siber dan Infrastruktur TI melalui WhatsApp;



Gambar 15. Sosialisasi Daring Layanan Virtual Private Network (VPN)

Kebijakan penggunaan VPN menekankan pada prinsip hak akses minimum, di mana pengguna hanya diberikan akses sesuai kewenangan masing-masing dan wajib menggunakan antivirus aktif. Terdapat larangan keras untuk berbagi akun, melakukan aktivitas ilegal seperti perjudian online, atau mengunduh konten bajakan. Pelanggaran terhadap aturan ini, termasuk berbagi pakai akun, akan berakibat pada penangguhan (*suspend*) akses dan pemberian surat teguran resmi. Seluruh aktivitas selama sesi VPN akan dicatat oleh Pusdatin, dan setiap insiden keamanan harus segera dilaporkan kepada tim terkait melalui kontak *helpdesk* yang tersedia.

4. Penyusunan data dukung untuk persiapan penilaian IKASANDI KKP 2026, meliputi:
 - a. Penyusunan draft SOP yang terkait dengan bidang keamanan siber KKP (SOP Komunikasi Eksternal, SOP Pemberkasan Arsip Digital, SOP Manajemen Patching)
 - b. Penyusunan dokumen CRF/*change request form* migrasi DNS dan migrasi data center
5. Sebagai bagian dari implementasi *Business Continuity Plan* (BCP), Pusdatin telah berhasil memigrasikan layanan *IP transit* dan *Metro-E* dari *Data Center* ke lokasi *Disaster Recovery Center* (DRC) pada 22-23 Januari 2026. Upaya pemutakhiran ini berlanjut pada 2 April 2026 melalui pembaruan *firmware* pada perangkat *switch* di *Data Center* serta perangkat *firewall FortiGate* di lokasi Gambir guna memastikan stabilitas kinerja dan optimalisasi keamanan sistem. Serangkaian langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan kesiapan layanan TI di lingkungan KKP.



Gambar 16. Kegiatan migrasi layanan *IP transit* dan *Metro-E* dari *Data Center* ke lokasi *Disaster Recovery Center* (DRC)



Gambar 17. Kegiatan pembaruan firmware pada perangkat switch di Data Center serta perangkat firewall FortiGate di lokasi Gambir

Di sisi lain, penguatan infrastruktur tersebut dilakukan di tengah tantangan keamanan siber yang cukup dinamis. Sepanjang triwulan pertama tahun 2026, tercatat enam insiden keamanan yang menysasar aset KKP, mencakup peretasan (*compromise*) server database e-pegawai, kebocoran data (*data exposure*) pada aplikasi *Command Center*, serta empat kasus *defacement* di lingkungan Balitbang. Selain itu, CSIRT KKP juga menindaklanjuti empat notifikasi insiden dari BSSN, termasuk satu laporan khusus terkait kebocoran data dari Badan Intelijen Negara (BIN).

6. Melakukan kegiatan operasional keamanan TI. Sebagai langkah preventif yang proaktif, Pusdatin secara rutin melaksanakan kegiatan *vulnerability assessment* guna mendeteksi celah keamanan sedini mungkin. Hingga saat ini, pengujian kerentanan telah dilakukan terhadap enam aplikasi dan layanan prioritas, di antaranya TPKP Nasional, E-Milea, hingga API Monsakti. Upaya mitigasi ini merupakan bagian integral dari komitmen kementerian dalam menjaga integritas data dan keberlangsungan seluruh layanan digital di lingkungan KKP.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan lanjutan pembahasan Keputusan Menteri Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
2. Penyusunan dokumen BCP (*Business Continuity Plan*)/Rencana Kelangsungan Bisnis dan DRP (*Disaster Recovery Plan*)/Rencana Pemulihan Bencana;
3. Melakukan lanjutan penyusunan draft SOP yang terkait dengan bidang keamanan siber KKP;
4. Melakukan updating formulir daftar risiko (*risk register*) dan survey kategorisasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);
5. Melaksanakan penilaian tingkat kematangan siber dan sandi 2026 bersama tim BSSN;
6. Melaksanakan *surveillance* kedua ISO 27001:2022 lingkup infrastruktur TI Pusdatin;

3.3.8.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP, pagu awal anggaran pada Rincian Output Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi senilai Rp847.612.0000 mengalami revisi menjadi Rp547.612.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp29.897.712 atau sebesar 5,46%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Persandian (IKASANDI) KKP.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU ini didukung oleh Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 7 orang dan Statistisi sebanyak 2 orang, kebutuhan saat ini masih membutuhkan 2 orang Pranata Komputer yang mempunyai kompetensi dibidang keamanan jaringan.

3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

3.3.9.1 Definisi Indikator Kinerja

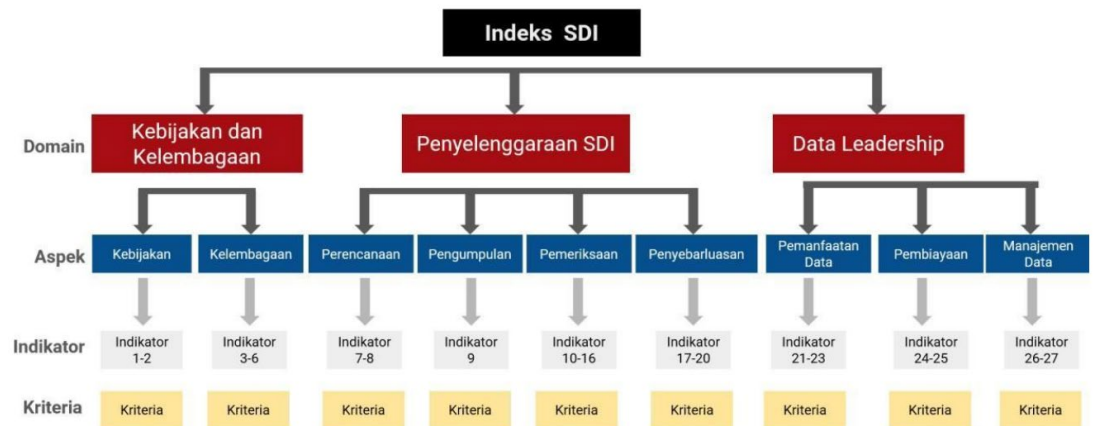
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai

transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di KKP. Hasil evaluasi penyelenggaraan SDI akan dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan oleh pembina Satu Data Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas.

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Gambar 18. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Kebijakan;
2. Kelembagaan;
3. Perencanaan;
4. Pengumpulan;
5. Pemeriksaan;
6. Penyebarluasan;
7. Pemanfaatan;
8. Pembiayaan; dan
9. Manajemen Data.

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI).

3.3.9.2 Analisa Capaian

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2025	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	89,17	64,68	83.69	65	-	-	-	65	-	66,5	-

Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.9.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya Perbaikan dan upaya penyempurnaan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. melaksanakan rapat koordinasi Integrasi Data Prioritas dengan Bappenas untuk pemenuhan penilaian maturitas satu data KP.
2. Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan hasil final evaluasi Indeks Satu Data Indonesia (SDI) 2025 kepada seluruh instansi, sesuai amanat RPJMN 2025-2029. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh nilai indeks 83,69 yang menunjukkan **peningkatan yang signifikan** dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 64,68, dengan kinerja tertinggi pada domain kelembagaan dan pemanfaatan data. Nilai tersebut meningkat, namun KKP memiliki kelemahan kritis pada aspek pengumpulan data (nilai 50) dan pemeriksaan data, yang menjadi fokus rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, KKP perlu segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi khusus untuk memperbaiki

proses pengumpulan dan validasi data guna meningkatkan skor indeks SDI di penilaian selanjutnya.



Gambar 19. Rapat Koordinasi Integrasi Data Prioritas

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan pembaruan Data Prioritas pada portaldata.kkp.go.id;
2. Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait standar data dan metadata statistik;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait mekanisme penarikan data geospasial KKP yang telah tersedia di JIGN agar dapat diintegrasikan ke portal SDI;
4. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretariat SDI terkait penyampaian API Data Prioritas yang telah diperbarui pada portal data KKP dan SPLP.

3.3.9.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan, pagu anggaran pada Rincian Output Data dan Informasi senilai Rp431.468.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp54.093.463 atau sebesar 12,54%. Realisasi tersebut digunakan

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU ini didukung oleh Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi dengan berbagai jenjang, dengan beban kerja yang ada saat ini, kebutuhannya telah mencukupi.

3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

3.3.10.1 Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan kerangka arsitektur SPBE telah diterapkan secara konsisten dan menyeluruh di lingkungan KKP. Indikator ini mencerminkan tingkat keselarasan antara perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi dengan prinsip-prinsip arsitektur SPBE yang telah ditetapkan.

Pengukuran indikator ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain ketersediaan dan kelengkapan dokumen arsitektur SPBE, implementasi enam domain arsitektur (proses bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan), serta tingkat integrasi antar sistem dan layanan digital. Selain itu, indikator ini juga menilai kesesuaian antara usulan dan pelaksanaan belanja TIK dengan arsitektur SPBE, yang umumnya dikendalikan melalui mekanisme *clearance* dan evaluasi perencanaan TIK.

Dalam konteks kinerja organisasi, indikator ini menunjukkan tingkat kematangan penerapan tata kelola SPBE, khususnya dalam memastikan bahwa pengembangan aplikasi dan layanan digital tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan mendukung proses bisnis secara *end-to-end*. Semakin tinggi implementasi kebijakan arsitektur SPBE, maka semakin baik juga kualitas integrasi sistem, efisiensi pengelolaan TIK, serta efektivitas layanan digital yang dihasilkan.

3.3.10.2 Analisa Capaian

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP Triwulan I Tahun 2026

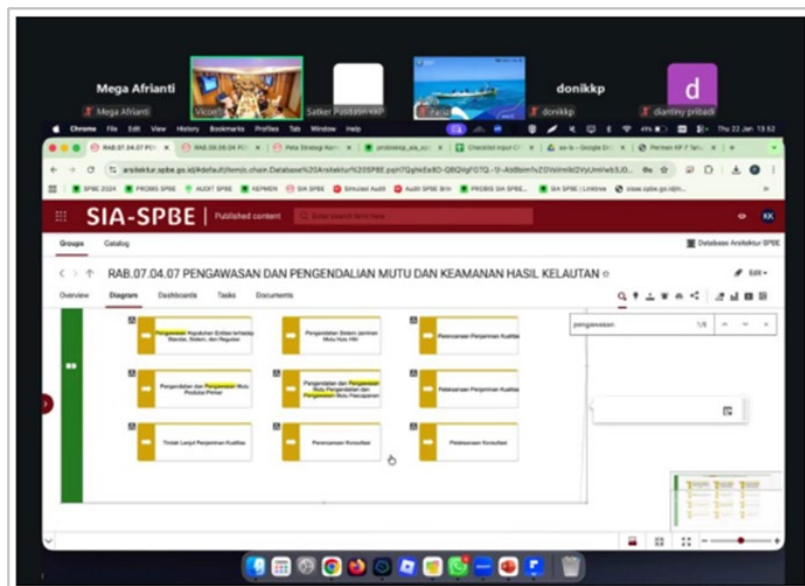
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	2	3	3	3	-	-	-	3	-	4	-

IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian PAN RB, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.10.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Pengisian Arsitektur SPBE lingkup KKP;
2. Pembahasan *Clearance* Belanja TIK TA 2026 lingkup KKP;
3. Pengajuan *Clearance* kepada Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta BAPPENAS;
4. Telah terbitnya rekomendasi *clearance* dari Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta BAPPENAS.



Gambar 20. Pengisian Arsitektur SPBE pada Aplikasi SIA-SPBE Lingkup Inspektorat Jenderal

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi terkait *Clearance* lingkup KKP dengan Eselon I KKP, Menpan, Bappenas, dan Komdigi;
2. Melakukan perbaikan/revisi KAK agar sesuai dengan SEB 2024, dan dalam menentukan kriteria clearance yang tidak sesuai dengan kategori dari item belanja SPBE; dan
3. Menyiapkan dokumen penilaian SIA-SPBE tahun 2026.

3.3.10.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP, pagu awal anggaran pada Rincian Output Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Informasi senilai Rp821.854.000 mengalami revisi menjadi Rp121.854.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp95.585.184 atau sebesar 78,44%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi *Clearance* Belanja TIK di Lingkungan KKP.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU ini didukung oleh Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan berbagai jenjang, dengan beban kerja yang ada saat ini, kebutuhannya telah mencukupi.

3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP

3.3.11.1 Definisi Indikator Kinerja

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

3.3.11.2 Analisa Capaian

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	2,68	2,73	2,73	2,75	-	-	-	2,75	-	2,77	-

Indikator Kegiatan Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP merupakan indikator kegiatan yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan

capaian yang dihasilkan, namun di triwulan I ini sudah dilakukan pembinaan statistik sektoral oleh BPS.

3.3.11.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah adanya kegiatan pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yaitu BPS melakukan pembinaan Identifikasi Kegiatan Statistik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 21. Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Upaya penyempurnaan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyesuaikan daftar identifikasi kegiatan statistik di KKP Tahun 2026 dengan data rencana induk KKP di Satu Data Indonesia;
2. Melakukan review Juknis Pedoman data dan informasi;
3. Mengusulkan kembali usulan nama untuk mendapatkan akses aplikasi Sistem Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (SIMBATIK);
4. Pembinaan selanjutnya akan dijadwalkan bulan April 2026.

3.3.11.4 Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, pagu anggaran pada Rincian *Output* Data

dan Informasi senilai Rp431.468.000. Hingga 31 Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp54.093.463 atau sebesar 12,54%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) KKP.

Dukungan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian IKU ini didukung oleh mayoritas pemangku jabatan fungsional statistisi sebanyak 17 orang dan telah terpenuhi kebutuhannya.

3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

3.3.12.1 Definisi Indikator Kinerja

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). IPP berfungsi sebagai instrumen pengukuran tingkat kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja pemerintah, dengan menilai aspek standar pelayanan, profesionalisme aparatur, sarana prasarana, serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pada pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri, disampaikan bahwa perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat 2 huruf b, yaitu salah satu tugas Penanggung jawab atau Pimpinan pelayanan publik adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Dengan demikian, diperlukan strategi khusus berupa pelaksanaan PEKPPP yang dilakukan secara mandiri, agar dapat melihat lebih jauh dampak yang diharapkan. Terdapat 2 (dua) bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional dan PEKPPP Mandiri Instansional. Untuk PEKPPP Mandiri Nasional,

nilai Indeks Pelayanan Publik diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Sedangkan PEKPPP Mandiri Instansional dilakukan oleh instansi masing-masing, tanpa keterlibatan Kementerian PANRB dalam proses pelaksanaannya, serta yang menerbitkan Indeks Pelayanan Publik adalah instansi terkait.

Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, IPP memiliki relevansi strategis karena unit-unit kerja di lingkungan KKP merupakan penyelenggara layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Kualitas pelayanan yang diberikan tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga pada keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saing nasional. Dengan menjadikan IPP sebagai indikator kinerja, KKP menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari capaian program dan output administratif, tetapi juga dari kepuasan, kepercayaan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat atas layanan publik. Hal ini sejalan dengan visi reformasi birokrasi, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.3.12.2 Analisa Capaian

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2026

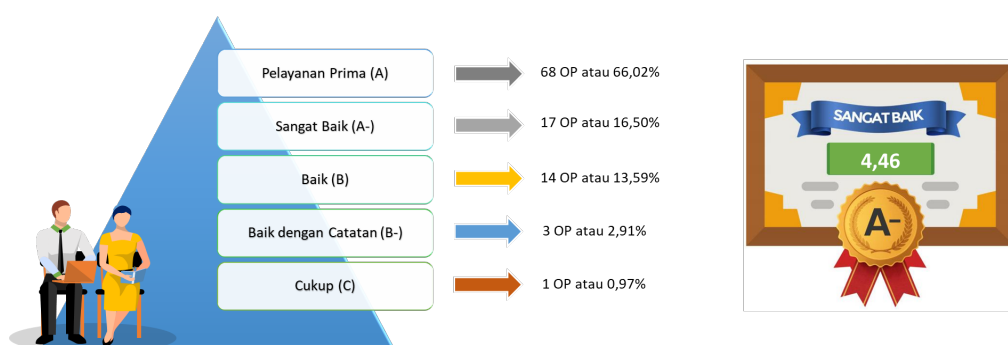
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks Pelayanan Publik KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	4,64	4,80	4,80	4,65	-	-	-	4,65	-	4,8	-

IKU Indeks Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) atau disebut sebagai PEKPPP Mandiri Nasional, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.12.3 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik adalah dengan menyusun rekapitulasi data IPP seluruh OP yang dilakukan PEKPPP Tahun 2025, baik Mandiri maupun Instansional untuk selanjutnya dilakukan pemeringkatan dan analisis capaian berdasarkan nilai per unsur pelayanan. Dalam hal rencana implementasi instrumen baru PEKPPP, KKP juga telah berperan menyampaikan masukan atas masing-masing aspek pertanyaan.



Gambar 22. Hasil Pelaksanaan PEKPPP Lingkup KKP Tahun 2025

Sementara itu, kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik adalah:

1. Koordinasi terkait pelaksanaan PEKPPP tahun 2026 dengan Inspektorat II selaku pengawas pelayanan publik di KKP dan Sekretariat Eselon I lingkup KKP;
2. Koordinasi mengenai mekanisme dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026 dengan Kementerian PANRB; dan
3. Uji coba penerapan instrumen PEKPPP baru pada OP dengan perolehan Nilai IPP tertinggi berdasarkan pemeringkatan sebanyak 41 OP Lokus PEKPPP Mandiri Tahun 2025 untuk menilai kesiapan KKP.

3.3.12.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan pagu pada Rincian Output (RO) Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap anggaran senilai Rp377.364.000 telah terealisasi per 31 Maret 2026 senilai Rp4.760.000 atau 1,26%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukung Indikator kinerja dimaksud adalah para jabatan fungsional Penata Perijinan yang saat ini berjumlah 6 orang pada PTSA, dan masih membutuhkan kurang lebih 4 orang.

3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

3.3.13.1 Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka melaksanakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi, Ombudsman melaksanakan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan rangkaian kegiatan sistematis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman untuk menyatakan Opini.

Indikator Kinerja tingkat kepatuhan standar pelayanan publik dalam konteks penilaian maladministrasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggara pelayanan publik melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, indikator ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memastikan bahwa setiap unit pelayanan publik bekerja sesuai dengan norma hukum, etika, dan standar pelayanan yang berlaku.

Indikator kinerja kepatuhan standar pelayanan publik dalam penilaian maladministrasi juga mencerminkan tingkat integritas dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin kecil potensi terjadinya maladministrasi, karena setiap proses pelayanan berjalan

transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator ini biasanya diukur melalui evaluasi terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan, seperti kejelasan prosedur, kepastian waktu, biaya, produk layanan, serta mekanisme pengaduan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga kualitas interaksi antara aparatur dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Selain itu, indikator ini berperan sebagai tolok ukur dalam upaya perbaikan berkelanjutan di bidang pelayanan publik. Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang rawan maladministrasi. Dengan adanya indikator ini, organisasi penyelenggara pelayanan publik dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, indikator kinerja kepatuhan standar pelayanan publik menjadi instrumen strategis untuk mencegah maladministrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas, profesional, adil, kerahasiaan, keterbukaan, dan partisipatif. Penilaian dilaksanakan oleh Ombudsman dan dapat melibatkan pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan. Ombudsman dapat melibatkan masyarakat dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai bentuk pengawasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik atas pelayanan barang, jasa, dan/atau administratif. Penilaian dimaksud dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif, dan diukur berdasarkan unsur penilaian dimensi, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan.

3.3.13.2 Analisa Capaian

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
-	-	88,86	90,15	90,15	88,9	-	-	-	88,9	-	88,99	-

IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.13.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP adalah:

1. Penyampaian Hasil Opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Lokus Penilaian yaitu 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut; 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut; dan
2. Penyampaian Data Unit dan Produk Pelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Ombudsman Republik Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.236/MEN-SJ/TU.210/III/2026 tanggal 27 Maret 2026.



Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, yaitu:

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, yaitu:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas saran penyempurnaan dari Ombudsman RI berupa pemberian apresiasi dan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memperoleh nilai kualitas pelayanan 78,00 – 100 berdasarkan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2025; dan
2. Melaksanakan koordinasi identifikasi dan inventarisasi data unit dan produk pelayanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan masing-masing sekretariat Ditjen/Badan pengampu pelayanan publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3.13.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan pelaksanaan penilaian ombudsman dengan pagu pada Rincian *Output* (RO) Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap anggaran senilai Rp377.364.000 telah terealisasi per 31 Maret 2026 senilai Rp4.760.000 atau 1,26%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukung Indikator kinerja

dimaksud adalah para jabatan fungsional Penata Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Atap KKP.

3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

3.3.14.1 Definisi Indikator Kinerja

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan KKP.

3.3.14.2 Analisa Capaian

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
Realisasi TW I 2021	Realisasi TW I 2022	Realisasi TW I 2023	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target TW I 2026	% Capaian Thdp Target TW I 2026	Target TW I 2029	% Capaian Thdp Target TW I 2029
-	-	86,79	90,94	91,80	89,70	93,52	104,25	1,72	89,70	104,25	89,95	96,18

Indikator Kinerja SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung berdasarkan periode triwulanan. Pengukuran SKM dilaksanakan atas pelayanan publik administratif, barang, dan jasa mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan validasi dilakukan setiap triwulan secara berjenjang, dimana di level Pusat validasi dilaksanakan bersama Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan selaku administrator Eselon I penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Nota Dinas Pusat Data dan Informasi Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 tanggal 8 April 2026 dengan perihal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **93,52** dari target 89,70 dengan persentase capaian sebesar 104,25% dengan kategori **‘Sangat Baik’**.

Tabel 30. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan I Tahun 2026

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai IKM
DJPRL	5	5	2	33	87,96
DJPK	9	9	12	270	92,19
DJPT	26	26	41	4.088	93,57
DJPB	16	16	22	1.017	94,79
DJPDSPKP	3	3	7	39	90,38
DJPSDKP	15	15	5	1.894	94,14
BPPSDMKP	38	29	14	2.772	90,30
BPPMHKP	48	48	10	2.783	96,19
SETJEN*	2	2	32	131	89,21
KKP	162	153	113	13.027	93,52 Sangat Baik

**) Termasuk layanan konsultasi tatap muka pada PTSA KKP*

Rincian nilai per Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2026 yaitu:

Tabel 31. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan I Tahun 2026

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1 - Persyaratan Layanan	3,782
U2 - Kemudahan Prosedur	3,763
U3 - Waktu Penyelesaian	3,739
U4 - Kesesuaian Biaya	3,745
U5 - Kesesuaian Produk	3,741
U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas	3,704
U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas	3,733
U8 - Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3,735
U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana	3,723

Realisasi Indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat KKP adalah **93,52** yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 89,70 dengan capaian **104,26%**. Analisis atas hasil SKM KKP Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebanyak 13.027 mencerminkan partisipasi masyarakat atas 113 layanan yang dilakukan survei pada 153 OP. Jumlah ini mengalami penurunan 14% dibandingkan responden Triwulan IV Tahun 2025 dikarenakan proses transisi perpindahan *barcode* SKM pada 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPRL dan DJPK pasca diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 93,52 dengan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik (A)”. Nilai IKM tersebut menunjukkan tren kenaikan sebagai salah satu indikator perbaikan kinerja penyelenggara pelayanan;

3. Sebanyak 9 (sembilan) OP lingkup BPPSDMKP tidak memiliki responden SKM dikarenakan masih melaksanakan survei melalui *google form* dan belum terakomodir dalam perhitungan aplikasi SKM. Sementara itu, 3 (tiga) OP dengan responden tunggal dianggap valid karena selaras dengan produk layanan yang diberikan, yaitu pada Direktorat Jasa Bahari, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar, dan Stasiun KIPM Tahuna; dan
4. Keseluruhan nilai unsur pelayanan atas IKM KKP mendapatkan Nilai rata-rata (NRR) lebih dari 3 (tiga) dengan rata-rata keseluruhan 3,741 dan menghasilkan IKM sebesar 93,52. Analisis unsur pelayanan dengan nilai terendah dilakukan secara mandiri di level OP sebagai penyelenggara layanan untuk menentukan kesesuaian tindak lanjut perbaikan. Hasil SKM KKP menunjukkan satu unsur terendah layanan adalah U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas.

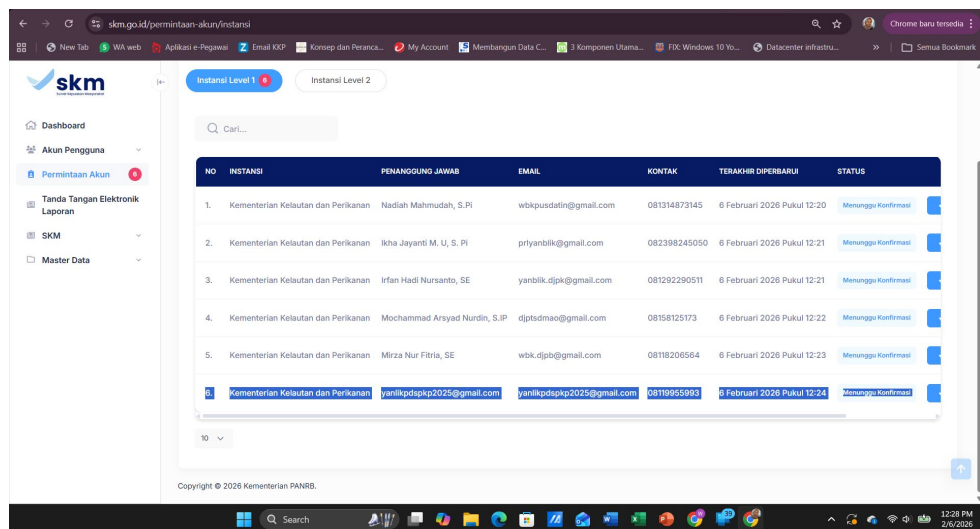
3.3.14.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan selama triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menyusun SK Tim Pengelola Aplikasi SKM *Online* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/SJ Tahun 2026;
2. Mendaftarkan dan aktivasi akun admin pengelola SKM *Online* pada aplikasi skm.go.id sesuai nama-nama yang ditugaskan;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB terkait implementasi SKM *Online* Nasional untuk meningkatkan kompetensi pengelola SKM Instansi;
4. Mengkoordinasikan proses persiapan admin level 1 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka transisi pelaksanaan SKM, dimana ditargetkan pada triwulan II mulai pindah menggunakan aplikasi SKM Nasional yang dikelola Kementerian PANRB pada laman skm.go.id.



Gambar 24. Validasi SKM KKP TW I Tahun 2026



Gambar 25. Pendaftaran Akun Admin Level 1 pada skm.go.id



Gambar 26. Koordinasi dan Pengenalan Aplikasi SKM Online Nasional

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Mempertahankan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP per triwulan, dimulai dari Triwulan II Tahun 2026;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait implementasi penyelenggaraan SKM *Online* Nasional melalui pemanfaatan bersama aplikasi skm.go.id dan keterkaitannya dengan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui kegiatan PEKPPP;
3. Menyusun master data OP dan Nama Layanan Publik Lingkup KKP sebagai *baseline* implementasi SKM Online Nasional berdasarkan kondisi nomenklatur eksisting.

3.3.14.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP melalui kegiatan Penilaian dan Validasi Survei Kepuasan Masyarakat KKP dengan pagu pada Rincian Output (RO) Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap anggaran senilai Rp377.364.000 telah terealisasi per 31 Maret 2026 senilai Rp4.760.000 atau 1,26%. Dengan Sumber Daya Manusia pendukung Indikator kinerja dimaksud adalah para jabatan fungsional Penata Perijinan pada Pelayanan Terpadu Satu Atap KKP.

3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

3.3.15.1 Definisi Indikator Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan mengetahui prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian Mandiri SAKIP ini mengacu kepada Pedoman Evaluasi AKIP lingkup Sekretariat Jenderal yang disusun Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyesuaian atas Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penilaian Mandiri SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP setiap Unit Eselon II dengan meliputi beberapa ruang lingkup, yaitu:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

3.3.15.2 Analisa Capaian

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
97,88	94,33	87,15	84,55	87,15	87,2	-	-	-	87,2	-	87,8	-

IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.15.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Meng-*upload* dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam *google drive*, <http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen>, <https://bit.ly/SAKIPPusdatin>, dan <https://linktr.ee/HSDMAOK2025>.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2026;
3. Menyusun Rincian Target Pusdatin Tahun 2026;
4. Menyusun Manual Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2026;
5. Menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) lingkup Pusdatin Tahun 2026;
6. Menyiapkan data capaian yang dihitung pada triwulan I tahun 2026;
7. Menyusun Evaluasi Rencana Aksi Pusdatin triwulan I tahun 2026;
8. Menyusun Laporan Kinerja Pusdatin triwulan I tahun 2026 dan data dukungnya agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP Setjen;
9. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU triwulan I tahun 2026;
10. Melakukan Dialog Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Pusat Data dan Informasi dengan seluruh tim kerja lingkup Pusdatin;
11. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Menyiapkan data capaian kinerja Pusdatin yang dihitung secara triwulanan dan semesteran untuk triwulan II tahun 2026;
2. Menyusun Evaluasi Rencana Aksi Pusdatin triwulan I dan menyusun Rencana Aksi Pusdatin Triwulan II tahun 2026;

3. Menyusun Laporan Kinerja Pusdatin triwulan II tahun 2026 dan data dukungnya agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP Setjen;



Gambar 27. Evaluasi Rencana Aksi TW I 2026 dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

3.3.15.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Pusdatin, Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin, dan Evaluasi Rencana Aksi Pusdatin dilaksanakan dengan Sumber Daya Manusia yang sudah mengerjakan pelaporan kinerja selama lebih dari 2 (dua) tahun. Alokasi untuk mendukung kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Layanan Umum (Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin) yang digunakan juga untuk membiayai operasional dengan alokasi anggaran awal senilai Rp2.198.744.000 dengan anggaran efektif yang dapat digunakan senilai Rp1.716.744.000 dengan realisasi senilai Rp625.177.668 (36,42%) dengan dukungan Sumber Daya Manusia pemangku jabatan fungsional Perencana, Pranata Komputer dan Pengadministrasi Perkantoran.

3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

3.3.17.1 Definisi Indikator Kinerja

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali/terkontrol, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu:

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1), baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50% : 50%.

3.3.17.2 Analisa Capaian

Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-	100	-

IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.17.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Penguatan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
2. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2025;
3. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan sebagai Tim Tindak Lanjut Lingkup Sekretariat Jenderal;
4. Monitoring kegiatan penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
5. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara *online*.



Gambar 28. Rapat Koordinasi dengan BPK lingkup Pusdatin

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan APIP/Itjen untuk monitoring progres tindak lanjut rekomendasi secara berkala;

2. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang spesifik, terukur, dan berbatas waktu (SMART) untuk setiap rekomendasi BPK yang diterima;
3. Melibatkan seluruh unit kerja terkait dalam pembahasan tindak lanjut, jangan hanya mengandalkan unit keuangan/akuntansi;
4. Memanfaatkan SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) untuk pelaporan progres tindak lanjut secara *real-time*, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tim BPK;
5. Melibatkan SDM dalam Bimtek Tindak Lanjut BPK untuk meningkatkan pemahaman mekanisme dan strategi penyelesaian rekomendasi;
6. Lakukan identifikasi akar masalah untuk mencegah temuan berulang di periode mendatang;
7. Menjadwalkan monitoring rutin minimal bulanan untuk memastikan progres penyelesaian rekomendasi sesuai target; dan
8. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan dan monitoring secara tepat waktu secara *online*.

3.3.17.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK pada Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Penyelesaian Rekapitulasi Permintaan Dokumen Temuan BPK. Alokasi untuk mendukung kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Layanan Umum (Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin) yang digunakan juga untuk membiayai operasional dengan alokasi anggaran awal senilai Rp2.198.744.000 dengan anggaran efektif yang dapat digunakan senilai Rp1.716.744.000 dengan realisasi senilai Rp625.177.668 (36,42%).

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan ini adalah SDM dengan jabatan fungsional sebagai Analis Pengelola Keuangan APBN, Perbendaharaan, Perencana, dan Pengadministrasi Perkantoran, sedangkan untuk mendukung IKU ini masih terdapat kekurangan SDM dengan jabatan fungsional Penata Laksana Barang yang akan melakukan pencatatan Barang Milik Negara (BMN).

3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

3.3.18.1 Definisi Indikator Kinerja

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terakhir dari masing-masing pegawai:
2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
 - a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
 - b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
 - c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
 - d. Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat

struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 3600;
4. **Disiplin (bobot 5%)** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinnya.

Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) Tahun 2024
Kategori dalam Pengukuran IP ASN yaitu:

Tabel 34. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

- Kualifikasi bobot nilai 25:

Tabel 35. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5

	Jabatan Pengawas	DIII	2 5	2 3	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	2 5	2 3	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA / Sederajat	2 5	2 3	22	21	20	15
		DIII	2 5	2 3	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	2 5	2 3	20	15	10	5
		S2	2 5	2 0	15	10	5	1

- Kompetensi bobot nilai 40:

Tabel 36. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

- Kinerja bobot nilai 30:

Tabel 37. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin bobot nilai 5:

Tabel 38. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

3.3.18.2 Analisa Capaian

Tabel 39. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
Semester I 2021	Semester I 2022	Semester I 2023	Semester I 2024	Semester I 2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	%	Target 2026	% Capaian Thdp	Target 2029	% Capaian Thdp

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
								Kenaikan Tahun 2025-2026		Target 2026		Target 2029
-	-	81,76	87,09	85,09	82,00	-	-	-	82,00	-	84	-

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin merupakan indikator yang dihitung dalam periode semesteran, sehingga pada triwulan I tahun 2026 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

3.3.18.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. ASN Pusdatin mengikuti pelatihan-pelatihan secara *daring* dan *luring* untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin; antara lain:
 - a. Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang diselenggarakan oleh SmartID pada tanggal 3 s.d 7 Februari 2026 di Bali;



Gambar 29. Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) oleh SmartID

- b. Pelatihan *Industry 4.0 and Future of Artificial Intelligence and Big Data Analytics* yang diselenggarakan oleh *Singapore Cooperation Programme* pada tanggal 9 s.d 14 Februari 2026 di Singapura;



Gambar 30. Pelatihan Industry 4.0 and Future of Artificial Intelligence and Big Data Analytics oleh Singapore Cooperation Programme

- c. Pelatihan *Basic* Perpajakan Brevet A dan B yang diselenggarakan oleh PT Mitra Pajakku pada tanggal 2 s.d 5 Maret 2026 di Yogyakarta.



Gambar 31. Pelatihan Basic Perpajakan Brevet A dan B yang diselenggarakan oleh PT Mitra Pajakku

2. Pegawai Pusdatin mengikuti ujian kompetensi menuju jenjang Madya yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi;
3. Memberikan motivasi tugas belajar/ijin belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. Penertiban pengisian SKP;
5. Penertiban LHKPN/LHKSN dengan sosialisasi dari Biro SDMAO;
6. Monitoring disiplin presensi pegawai lingkup Pusdatin.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Memberikan informasi pelatihan/Bimtek dan seminar terkait dengan kompetensi pegawai lingkup Pusdatin baik secara *daring* atau *luring* secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;
2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP dan Biro SDMAO;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

3.3.18.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM (Sertifikasi) Bidang Data dan Informasi yang dilaksanakan oleh pengelola SDM dengan jabatan fungsional Analis SDM, Perencana, dan Pengadministrasi Perkantoran. Saat ini masih terdapat kekurangan jabatan fungsional Analis SDMA dan Organisasi. Alokasi untuk mendukung kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Layanan Umum (Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin) yang digunakan juga untuk membiayai operasional dengan alokasi anggaran awal senilai Rp2.198.744.000 dengan anggaran efektif yang dapat digunakan senilai Rp1.716.744.000 dengan realisasi senilai Rp625.177.668 (36,42%).

3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

3.3.19.1 Definisi Indikator Kinerja

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satuan Kerja Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP

pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 95% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

3.3.19.2 Analisa Capaian

Tabel 58. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin											
Realisasi Triwulan I Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
100	100	100	100	100	86,00	100	116,28	-	86,00	116,28	89,00	112,35

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin merupakan indikator yang dihitung dalam periode triwulanan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1172/SJ.2/TU.210/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2026, Pusdatin mendapatkan capaian sebesar 100% Berikut adalah capaian pada triwulan I tahun 2026:

Tabel 40. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	13	13	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	0	N/A	100%	0	0%
3	Biro Hukum	0	N/A	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	0	N/A	100%	0	0%
5	Biro Humas dan KLN	0	N/A	100%	0	0%
6	Biro Umum	0	N/A	100%	0	0%
7	Biro PBJ	0	N/A	100%	0	0%
8	Pusdatin	16	16	100%	0	0%
9	Puskajis	0	N/A	100%	0	0%
10	LPMUKP	10	10	100%	0	0%
11	BPISDKP	0	N/A	100%	0	0%
Total		39	39	100%	0	0%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin triwulan I tahun 2026 telah melebihi target dikarenakan seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin telah dilaksanakan dari 24 (dua puluh empat) rekomendasi telah dituntaskan seluruhnya. Jika dibandingkan dengan Biro lain Pusdatin mendapatkan nilai yang sama sebesar 100% dengan 10 (sepuluh) Biro/Badan/Lembaga lingkup Sekretariat Jenderal.

3.3.19.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Menerapkan Siklus Manajemen Kinerja secara konsisten dalam setiap siklus perencanaan dan evaluasi kinerja untuk memastikan perbaikan berkelanjutan;
2. Melakukan evaluasi kendala setiap triwulan sebagai dasar perbaikan kinerja periode berikutnya, untuk Identifikasi akar masalah secara sistematis;

3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindak lanjut rekomendasi; dan
4. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/*review* dari Inspektorat Jenderal KKP.



Gambar 32. Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bulanan Tahun 2026

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Mengembangkan fitur otomatisasi pada sistem pelaporan internal, terutama untuk data yang bersumber dari sistem lain (*single source of truth*), sehingga tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dipantau secara real-time dan akuntabel;
2. Mengembangkan atau mengadopsi aplikasi serupa yang secara khusus dirancang untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal (dari Itjen atau APIP);
3. Melakukan pembaruan (*update*) sistem monitoring yang sudah ada dengan fitur-fitur yang lebih responsif terhadap kebutuhan percepatan tindak lanjut. Inovasi tidak harus selalu berupa aplikasi baru; optimalisasi sistem yang sudah berjalan juga merupakan inovasi yang berdampak;
4. Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK/Itjen dalam bentuk video, studi kasus, atau

knowledge base. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja lain dan bukti perbaikan kinerja berkelanjutan;

5. Merancang inovasi yang secara eksplisit terkait dengan IKU "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan". Dengan demikian, inovasi memiliki target yang jelas dan kontribusinya terhadap perbaikan kinerja dapat diukur;
6. Menjadikan hasil evaluasi eksternal (misalnya dari BPK, Itjen, atau asesmen SAKIP) sebagai dasar inovasi dan revisi dokumen perencanaan. Ini memastikan bahwa setiap rekomendasi pengawasan benar-benar mendorong perbaikan kinerja secara terstruktur;
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada triwulan selanjutnya.

3.3.19.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pusdatin melalui melalui kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Pelaporan Keuangan.

Alokasi untuk mendukung kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Layanan Umum (Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin) yang digunakan juga untuk membiayai operasional dengan alokasi anggaran awal senilai Rp2.198.744.000 dengan anggaran efektif yang dapat digunakan senilai Rp1.716.744.000 dengan realisasi senilai Rp625.177.668 (36,42%). Sumber Daya Manusia pendukung kegiatan ini adalah Jabatan Fungsional APK APBN, Pengelola Keuangan, Perencana, Pengadministrasi Perkantoran, dan Pranata Komputer.

3.3.20 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

3.3.20.1 Definisi Indikator Kinerja

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2026, dan merupakan hasil perhitungan

capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2026.

3.3.20.2 Analisa Capaian

Tabel 41. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin											
Realisasi Tahun 2021-2025					Tahun 2026				Rancangan Renstra Setjen Tahun 2025-2029			
2022	2022	2023	2024	2025	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Tahun 2026	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian Thdp Target 2026	Target 2029	% Capaian Thdp Target 2029
99,06	99,45	99,15	99,49	99,93	95	-	-	-	95	-	95	-

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan IKU yang dihitung dalam periode tahunan, namun berdasarkan pemantauan pada Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan realisasi akrual Pusdatin s.d Triwulan I tahun 2026 per 31 Maret 2026 senilai **Rp29.944.166.813,-** atau **51,43%** dari pagu efektif senilai **Rp58.173.803.000,-** dan adapun sisa pagu efektif senilai **Rp28.091.254.187,-**

3.3.20.3 Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan pada triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan Perencanaan yang Lebih Matang, dengan perbaikan utama dilakukan pada tahap perencanaan agar tidak terjadi revisi di tengah jalan yang menghambat serapan.
2. Penguatan kualitas Rencana Penarikan Dana (RPD), yang diharapkan RPD Triwulan I menjadi fokus utama karena merupakan kunci untuk menghindari deviasi (penyimpangan) antara rencana dan realisasi.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, dengan dibuktikan penyerapan anggaran di Triwulan 1 Tahun 2026 terserap dengan cepat diawal tahun. Serta kesiapan Kontraktual untuk belanja modal atau jasa konsultasi, pendaftaran

kontrak ke KPPN diupayakan terjadi di Triwulan I dan maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

4. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendahara Keuangan.
5. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran.
6. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
7. Memaksimalkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena dengan adanya SDM yang paham sistem, diharapkan mulai dari perencanaan anggaran yang menysasar para operator dan penyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk memastikan pemahaman yang sama tentang regulasi terbaru (misalnya penggunaan aplikasi SAKTI) dapat direalisasikan dengan baik.
8. Memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi Administrasi Keuangan, yang diharapkan proses administrasi keuangan dengan cepat, efektif dan efisien yang akan menentukan kecepatan serapan anggaran Pusdatin, seperti:
 - a. Pengajuan Tagihan Cepat: Memastikan SPM (Surat Perintah Membayar) diajukan maksimal 17 hari kerja sejak barang diterima (BAST/BAPP), tidak menumpuk di akhir bulan.
 - b. Optimalisasi Aplikasi: Pengisian data capaian output dan realisasi fisik pada aplikasi (SAKTI/OMSPAN) dilakukan disiplin setiap bulan, paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir, untuk memastikan data yang ditampilkan real-time dan akurat.



Gambar 33. Rapat Penyampaian Realisasi dan Pembahasan Rencana Penarikan Dana (RPD) lingkup Pusdatin

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. Meminimalkan Revisi DIPA, dengan menyusun rencana yang matang agar frekuensi revisi DIPA dapat ditekan (target maksimal 1 kali per semester), karena revisi yang sering merupakan indikator perencanaan yang buruk.
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan dan Percepatan proses lelang atau tender tidak ditunggu hingga pertengahan tahun, tetapi dimulai sejak awal Januari 2026 untuk memastikan kontrak sudah bisa ditandatangani dan dicairkan di awal tahun.
3. Penyusunan target RPD lebih akurat dan konsisten dibandingkan target nasional, dengan target realisasi hingga lebih dari 25% di Triwulan I untuk menunjukkan kesiapan satuan kerja.
4. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan.
5. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3.3.20.4 Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin, melalui kegiatan Pemantauan dan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran Pusdatin. Alokasi untuk mendukung kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Layanan Umum (Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Pusdatin) yang digunakan juga untuk membiayai operasional dengan alokasi anggaran awal senilai Rp2.198.744.000 dengan anggaran efektif yang dapat digunakan senilai Rp1.716.744.000 dengan realisasi senilai Rp625.177.668 (36,42%).

Sumber Daya Manusia pendukung kegiatan ini adalah Jabatan Fungsional APK APBN, Pengelola Keuangan, Perencana, Pengadministrasi Perkantoran, Pranata Komputer, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya lingkup Pusdatin.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026 adalah senilai **Rp77.155.803.000,-** dengan adanya blokir efisiensi senilai **Rp18.982.000.000,-** sehingga pagu efektif menjadi senilai **Rp58.173.803.000,-**

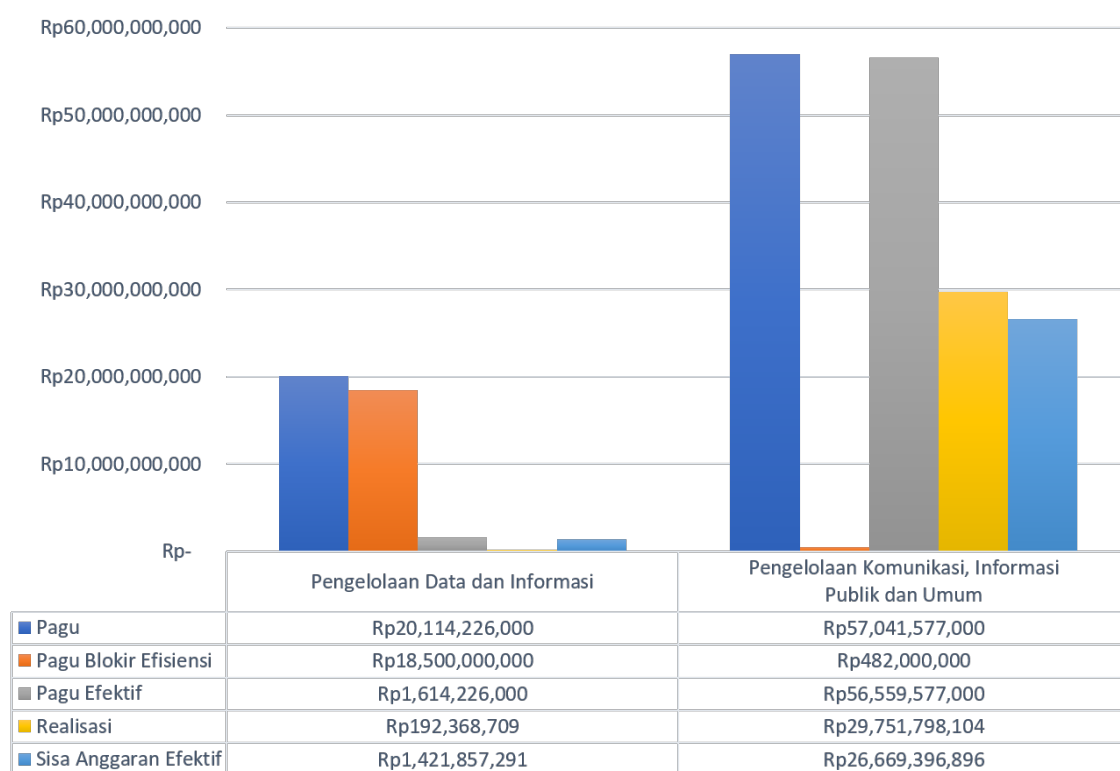
Terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran. Untuk Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan Teknis Pusdatin, dengan 3 Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu (1) Data dan Informasi; (2) Sistem Informasi Pemerintahan; dan (3) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk penjelasan lebih rinci, alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 31 Maret 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 42. Target dan Realisasi Akrual Anggaran Pusdatin Menurut Output Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output (RO)	Pagu Awal (Rp)	Pagu Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran Efektif		Sisa Anggaran Efektif per 31 Maret 2026 (Rp)
				(Rp)	(%)	
Pengelolaan Data dan Informasi	20.114.226.000	18.500.000.000	1.614.226.000	192.368.709	11,92	1.421.857.291
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum	57.041.577.000	482.000.000	56.559.577.000	29.751.798.104	52,60	26.669.396.896
TOTAL	77.155.803.000	18.982.000.000	58.173.803.000	29.944.166.813	51,47	28.091.254.187

Untuk total pagu Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2026 senilai **Rp77.155.803.000,-** sedangkan blokir efisiensi senilai **Rp18.982.000.000,-** atau 24,60% dari total pagu Anggaran, sedangkan untuk pagu efektif senilai **Rp58.173.803.000,-** dan realisasi akrual per 31 Maret 2026 senilai **Rp29.944.166.813,-** atau **51,43%** adapun sisa pagu efektif senilai **Rp28.091.254.187,-**



Gambar 34. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Triwulan I Tahun 2026

BAB 4

PENGHARGAAN DAN KEGIATAN LAIN

4.1 Penghargaan



Gambar 35. Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai bebas dari maladministrasi pada tanggal 29 Januari 2026.

4.2 Kegiatan Lain

Pada Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2026, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan tidak

dicantumkan dikarenakan tidak adanya usulan penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahun 2026.

Diluar mekanisme program penyusunan tersebut, sampai dengan Semester I Tahun 2026, Pusdatin telah melakukan penyusunan 3 (tiga) Keputusan Menteri tentang SK Tim, dan 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dengan mitra. Upaya penyempurnaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tim Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/SJ Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Atap;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14/SJ Tahun 2026 tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor: 01/SJ/KKP/PKS/I/2026 dan Nomor: A.1/HK.610/PKS/01/2026 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan
5. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Data dan Informasi dengan Badan Sandi Siber Negara;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Data dan Informasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya untuk mendukung penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Sama lingkup Pusdatin, antara lain:

1. Menyiapkan rancangan Keputusan Menteri lingkup bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan berikutnya, salah satunya

rancangan Keputusan Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data; dan

2. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama berbagi pakai data antara lain dengan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, 1 (satu) secara semesteran, dan 16 (enam belas) secara tahunan.

Berikut adalah capaian kinerja Pusat Data dan Informasi pada triwulan I tahun 2026 berdasarkan aplikasi Kinerjaku dengan didukung oleh 76 Jabatan Fungsional lingkup Pusdatin dan 19 Jabatan Fungsional Umum:

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku triwulan I tahun 2026 adalah **110,27** dengan predikat '**Istimewa**';
2. Terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya dinilai pada triwulan I tahun 2026, yaitu:
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (**Target: 89,70, Realisasi: 93,52, Persentase Capaian: 104,26%**);
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (**Target: 86,00, Capaian: 100,00, Persentase Capaian: 116,28%**);
3. Total pagu Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2026 senilai **Rp77.155.803.000,-** sedangkan blokir efisiensi senilai **Rp18.982.000.000,-** atau 24,60% dari total pagu Anggaran, sedangkan untuk pagu efektif senilai **Rp58.173.803.000,-** dan realisasi akrual per 31 Maret 2026 senilai **Rp29.944.166.813** atau **51,43%** adapun sisa pagu efektif senilai **Rp28.091.254.187,-**

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Data dan Informasi pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
2. Menyusun Evaluasi Rencana Aksi triwulan II tahun 2026 beserta bukti dukung hasil evaluasi rencana aksi;
3. Melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya pada masing-masing Tim Kerja lingkup Pusdatin, antara lain:
 - a. Percepatan Pendataan Kusuka
 - b. melakukan evaluasi dan rekonsiliasi aplikasi lingkup KKP.
 - c. Penguatan dukungan terhadap operasional *hybrid meeting*, melalui optimalisasi perangkat audio-visual dan jaringan, guna memastikan kualitas komunikasi yang stabil dan profesional dalam berbagai skenario kegiatan pimpinan.
 - d. Pembahasan Rancangan Kepmen tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
 - e. Sosialisasi Penyusunan Proposal Inovasi kepada Eselon I terkait lingkup KKP
 - f. Penyusunan dokumen BCP (*Business Continuity Plan*)/Rencana Kelangsungan Bisnis dan DRP (*Disaster Recovery Plan*)/Rencana Pemulihan Bencana
 - g. Melakukan pembaruan Data Prioritas pada portaldata.kkp.go.id
 - h. Menyiapkan dokumen penilaian SIA-SPBE tahun 2026.
 - i. Menyesuaikan daftar identifikasi kegiatan statistik di KKP Tahun 2026 dengan data rencana induk KKP di Satu Data Indonesia
 - j. Koordinasi mengenai mekanisme dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026 dengan Kementerian PANRB
 - k. koordinasi identifikasi dan inventarisasi data unit dan produk pelayanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan masing-masing

sekretariat Ditjen/Badan pengampu pelayanan publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- I. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait implementasi penyelenggaraan SKM *Online* Nasional melalui pemanfaatan bersama aplikasi skm.go.id dan keterkaitannya dengan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui kegiatan PEKPPP



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Pusdatin 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PUSAT DATA DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data dan Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aulia Riza Farhan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT DATA DAN INFORMASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (%)	92
		2	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,6
		3	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (%)	78
		4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,3
		5	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	78
		6	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	92
		7	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100
		8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,1
		9	Tingkat Maturitas Satu Data KP (%)	65
		10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75
		12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,65
		13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	88,9
		14	Survei Kepuasan Masyarakat KKP (nilai)	89,7
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data dan Informasi	15	Nilai PM SAKIP Pusdatin (nilai)	87,2
		16	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusdatin (%)	100
		17	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin (indeks)	82,5
		18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (%)	86
		19	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	29.901.795.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	65.740.866.000
Total Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun 2026		95.642.661.000

Jakarta, 26 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Data dan Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aulia Riza Farhan

Lampiran Dokumen Pendukung

Tabel 43. Lampiran Dokumen Pendukung pada Rencana Aksi Pusdatin TW I 2026

No.	Dokumen	Bukti Link
1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1boWqzdpXvYVDrF-qUznx-hA51sUeDcSi?usp=sharing
2.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	https://drive.google.com/drive/folders/1jAeAEAZ31PVgPn0foq5CfjJdWp6DC6dZ?usp=sharing
3.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	https://drive.google.com/drive/folders/1iF2AcS-vNohDvMgqiuctfbjxokJbQTW?usp=sharing
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1TTBaPp8vp3Bnn9kW-RiQnplSDfPiFrXS?usp=sharing
5.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1CCNKfBzYJmKZ0iY321Y88khRbZeJi1TI?usp=sharing
6.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1CCNKfBzYJmKZ0iY321Y88khRbZeJi1TI?usp=sharing
7.	Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	https://drive.google.com/drive/folders/18J9gODerE49yUsnOVmYlcnRiNS0CeEvc?usp=sharing
8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	https://drive.google.com/drive/folders/18S4EHGbtclAj6UTuJiQRrCcmuCFjGmx?usp=sharing
9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/16OWOQpNhfYMqXgzLyXvic10UuGRTHTX?usp=sharing
10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1-qYitl65XmBHWUxID6mQhe2F_q8GEIXg?usp=sharing
11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1ytMgg9OEu0ZB3qWicxLEm_6exgGCD-EL?usp=sharing
12.	Indeks Pelayanan Publik KKP	https://drive.google.com/drive/folders/13gBS1OkIsZjwuZYmafRJmZiARZCF0yX9?usp=sharing
13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	https://drive.google.com/drive/folders/1qVPB99PP9QFRaUSA1d8HMK-WaVWJCRWD?usp=sharing
14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/1-XkoCfU02MnkBeyLAvvr_fZOcxJYHC7R?usp=sharing
15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	https://drive.google.com/drive/folders/1P2zvZzlnhF5m1t0Le58oluzSINi8-5aX?usp=sharing
16.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di	https://drive.google.com/drive/folders/16rp5YniVbr132SKXo08kG1xqEWwnLX6N?usp=sharing

No.	Dokumen	Bukti Link
	Lingkungan Pusdatin	
17.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1j-4xcjdPRIjmub7OoU5jEMGOelO8yY3v?usp=sharing
18.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1juBYtpfGaFh3xlSnGMXi8jOcB3uV1JBj?usp=sharing
19.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1oJfueOo7uC29LivUMYky1UpmQcvVPIW?usp=sharing



PUSAT DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN